



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018

BAB I

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dirubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2018 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1 Pemerintahan
- 2.2 Entitas Pelaporan
- 2.3 Entitas Akuntansi
- 2.4 Badan Layanan Umum
- 2.5 Perusahaan Daerah

Bab III Kebijakan Keuangan (Fiskal) dan Ekonomi Makro

- 3.1 Kebijakan Keuangan (Fiskal)
- 3.2 Ekonomi Makro

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 4.1 APBD dan Perubahannya
- 4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab V Kebijakan Akuntansi

- 5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran
- 5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 6.1 Penjelasan Pos Neraca
- 6.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 6.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 6.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
- 6.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- 6.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Bab VII Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB II

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1 Pemerintahan

2.1.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten, Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

2.1.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 716 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2016). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sos, MAP dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH, MA. Tahun 2016 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2016 - 2021.

2.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018.

2.3 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 10 Unit Bagian), 23 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

2.4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem baru bisa diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010. BLUD RSUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta RSUD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan RSUD yang memuat BLUD didalamnya.

2.5 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB III

Kebijakan Keuangan (Fiskal) dan Ekonomi Makro

3.1 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dalam penetapan PAD agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, peningkatan dari potensi pendapatan obyek yang ada, kebijakan pemerintah, dan faktor keamanan. Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu : sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- 2) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
- 3) Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan

- 4) Menjaga dan mengembangkan stabilisasi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan arah kebijakan ditekankan pada upaya antara lain: (1) peningkatan penanggulangan kemiskinan, (2) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, (3) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (4) peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro, (6) peningkatan produktifitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif, (7) serta meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai tahun sebelumnya, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan sosial yang dihadapi masih diwarnai dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, kekeringan dan kesempatan kerja, yang lebih lanjut mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah dan tantangan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah, yang ditandai dengan tingkat kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antar kelompok. Sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Disisi lain kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat belum sesuai harapan, keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial merupakan tantangan lain yang harus dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok.
- 2) Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah sudah menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberhasilan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka otomatis mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah. Hal ini memperhatikan investasi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh sektor penataan ruang khususnya di 3 kawasan pariwisata.

Permasalahan lainnya adalah pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini diakibatkan berbagai permasalahan seperti masih banyaknya lahan-lahan yang belum produktif akibat ketersediaan air, masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, belum bagusnya pemasaran komoditas spesifik daerah dan masih rendahnya minat investasi untuk pengembangan di bidang pertanian.

- 3) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, secara umum masih ada beberapa wilayah terpencil, sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup memadai. Dengan panjang jalan lebih dari 600 km, tantangan kedepan adalah memelihara kondisi jalan tersebut agar tetap berfungsi optimal. Namun demikian untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kedepan diperlukan peningkatan infrastuktur transportasi yang dapat menstimulir terciptanya keseimbangan antar wilayah.

Air baku, baik untuk air minum maupun pertanian dan peternakan, masih menjadi permasalahan, terutama untuk wilayah-wilayah kering. Pembangunan sistem penyediaan air baku dihadapkan pada masalah sumber mata air. Sumber mata air berada disebagian wilayah saja dan berada umumnya lebih rendah dari wilayah pelayanan.

Penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan perkembangan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi berbagai peraturan yang berlaku dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait penataan ruang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka strategi pembangunan daerah antara lain adalah:

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pencapaian makro ekonomi yang lebih baik dan berkualitas;
- 2) Menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi terutama sektor unggulan daerah;
- 3) Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berprestasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan
- 5) Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata di kawasan strategis kabupaten.

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2018 adalah:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran;
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan;
- 4) Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM;
- 5) Infrastruktur;
- 6) Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 7) Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8) Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan;
- 9) Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana;
- 10) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

3.2 Ekonomi Makro

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 903/1924/Bappelitbangda /Nomor 903/315/DPRD tanggal 25 September 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Nomor 903/1925/Bappelitbangda /Nomor 903/316/DPRD tanggal 25 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2018, prioritas pembangunan daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing – masing daerah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa indikator penting yang menjadi fokus kebijakan pemerintah diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.

Pembangunan Kabupaten Karangasem tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi disamping kondisi ekonomi Global, adanya regulasi pusat terkait efisiensi dan efektivitas anggaran, dan adanya penegakan Perda 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem terkait Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang menyebabkan menurunnya beberapa produktivitas unggulan Kabupaten Karangasem secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2018 berdasarkan data terakhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Kabupaten Karangasem adalah:

- 1) Kondisi perekonomian daerah tetap stabil;
- 2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan;

- 3) Perkembangan industri kepariwisataan semakin membaik dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- 4) Meningkatnya investasi;
- 5) Tidak terjadinya kenaikan harga BBM; listrik dan
- 6) Stabilitas keamanan tetap kondusif.

3.2.2 Lain-lain Asumsi

- 1) Peningkatan penanaman modal daerah (PMD) dan penanaman modal asing (PMA), serta meningkatnya ekspor khususnya ekspor barang akan memberikan efek positif bagi sektor industri serta beberapa sektor yang merupakan efek dari kegiatan ekspor ini.
- 2) Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017;
 - b. Capaian-capaian pada tahun sebelumnya; dan
 - c. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani yaitu masih tingginya jumlah rumah tangga miskin, rendahnya capaian IPM, masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Karangasem, masih tingginya kematian ibu melahirkan dan bayi, masih tingginya gizi buruk, belum optimalnya pembangunan infrastruktur (akses pelabuhan, jaringan jalan, air minum, listrik, pengadaan tanah dan sanitasi), belum optimalnya sistem pelayanan investasi, rendahnya daya saing hasil – hasil pertanian dalam arti luas, meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem, belum terjaganya lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam, rendahnya peningkatan SDM dalam penerapan teknologi tepat guna, serta belum meratanya pembangunan antar kecamatan.

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional.

Pada tahun 2017 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, disamping dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan tarif dasar listrik, kondisi musim yang tidak stabil menyebabkan produktivitas produk unggulan menurun dimana secara nasional pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 5,4% - 6,1%, hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sehingga pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem direncanakan sebesar 5,22% - 5,90%.

3.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 berdasarkan harga berlaku ditargetkan mencapai 15 triliun rupiah lebih. Sedangkan PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga konstan 2010 ditargetkan mencapai 10 triliun rupiah lebih. Target tersebut dapat dicapai apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga – harga produksi tidak mengalami penurunan.

3.2.5 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 didominasi sektor tersier dengan kontribusi sebesar 59,77%, sektor primer memberikan kontribusi 30,20% dan sektor sekunder sebesar 10,03%. Sejalan dengan perkembangan pembangunan maka pada tahun 2018 secara berangsur-angsur sektor primer akan bergeser ke sektor tersier terutama disektor jasa, namun demikian guna mempertahankan ketahanan pangan maka sektor primer harus tetap mendapatkan perhatian.

Atas dasar kondisi ekonomi makro tersebut, penyusunan APBD 2018 dan perubahannya dilakukan dan diupayakan realistis sesuai kebutuhan dan kemampuan nyata daerah dengan memperhatikan skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan.

3.2.6 Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Bali yang dihitung berdasarkan survey di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan, namun masih dalam batas kewajaran karena masih dibawah dua digit, namun demikian sekiranya stabilitas perekonomian daerah perlu dikendalikan. Pada tahun 2016 laju inflasi mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2016, dengan terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah diharapkan stabilitas perekonomian daerah dapat terjaga, khususnya terhadap harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pada tahun 2018 inflasi akan dikendalikan pada kisaran 4 ± 1 %.

BAB IV
Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

4.1 APBD dan Perubahannya

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak melaksanakan perubahan APBD. Pelaksanaan APBD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sampai akhir tahun anggaran dilakukan pergeseran anggaran dalam Penjabaran APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Target kinerja APBD Tahun 2018 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

No	Uraian	APBD	Pergeseran APBD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.561.878.043.097,72	1.561.741.927.097,72	(136.116.000,00)	(0,01)
01.01	Pendapatan Asli Daerah	234.000.000.000,00	234.000.000.000,00	-	-
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	116.501.484.429,82	116.501.484.429,82	-	-
01.01.02	Hasil Retribusi Daerah	18.362.770.000,00	18.362.770.000,00	-	-
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	11.741.521.666,18	11.741.521.666,18	-	-
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.394.223.904,00	87.394.223.904,00	-	-
01.02	Dana Perimbangan	953.288.305.000,00	953.288.782.000,00	477.000,00	-
01.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.994.833.000,00	23.994.833.000,00	-	-
01.02.02	Dana Alokasi Umum	729.378.991.000,00	729.378.991.000,00	-	-
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	199.914.481.000,00	199.914.958.000,00	477.000,00	-
01.03	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	374.589.738.097,72	374.453.145.097,72	(136.593.000,00)	(0,04)
01.03.01	Pendapatan Hibah	56.872.100.000,00	56.872.100.000,00	-	-
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.854.628.789,52	114.854.628.789,52	-	-
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.626.212.000,00	99.489.619.000,00	(136.593.000,00)	(0,14)
01.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	103.236.797.308,20	103.236.797.308,20	-	-
01.03.07	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-

Pada tahun 2018 tidak dilaksanakan Perubahan APBD sehingga target pendapatan daerah tidak mengalami perubahan kecuali perubahan untuk pendapatan transfer. Dari

data tersebut di atas diketahui terdapat penurunan anggaran pendapatan pada pergeseran APBD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp136.116.000,00 atau 0,01%.

b. Anggaran Belanja

No	Uraian	APBD	Pergeseran APBD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Belanja	1.598.133.043.097,72	1.597.996.927.097,72	(136.116.000,00)	(0,01)
02.01	Belanja Tidak Langsung	936.156.925.508,14	938.734.812.573,77	2.577.887.065,63	0,28
02.01.01	Belanja Pegawai	713.450.212.200,26	720.762.855.708,99	7.312.643.508,73	1,02
02.01.02	Belanja Bunga	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
02.01.04	Belanja Hibah	7.143.000.000,00	7.143.000.000,00	-	-
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	24.650.000.000,00	24.650.000.000,00	-	-
02.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	17.532.353.075,88	17.532.353.075,88	-	-
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	165.281.360.232,00	165.144.767.232,00	(136.593.000,00)	(0,08)
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	3.401.836.556,90	(4.598.163.443,10)	(57,48)
02.02	Belanja Langsung	661.976.117.589,58	659.262.114.523,95	(2.714.003.065,63)	(0,41)
02.02.01	Belanja Pegawai	37.757.795.742,87	31.499.370.770,87	(6.258.424.972,00)	(16,58)
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	437.427.670.169,71	445.552.903.519,73	8.125.233.350,02	1,86
02.02.03	Belanja Modal	186.790.651.677,00	182.209.840.233,35	(4.580.811.443,65)	(2,45)

Secara total pergeseran anggaran belanja daerah mengalami penurunan dari anggaran induk sebesar Rp136.116.000,00 atau 0,01%. Hal tersebut disebabkan penurunan pada pergeseran anggaran pendapatan daerah. Pergeseran anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja tidak langsung sebesar Rp2.577.887.065,63 serta penurunan pada belanja langsung sebesar Rp2.714.003.065,63. Pergeseran anggaran disesuaikan dengan target pendapatan daerah serta kebutuhan belanja untuk program dan kegiatan yang lebih prioritas. Peningkatan dan penurunan anggaran belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. Hal ini disebabkan guna memenuhi amanat PP Nomor 18 Tahun 2017;
- 2) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mengalami penurunan dari anggaran induk. Hal ini disebabkan terjadi perubahan anggaran pendapatan dana penyesuaian dari pusat;
- 3) Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan dibandingkan anggaran induk. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung; dan
- 4) Belanja Langsung mengalami penurunan dibanding anggaran induk. Baik dari belanja pegawai maupun belanja modal.

c. Anggaran Pembiayaan

No	Uraian	APBD	Pergeseran APBD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Pembiayaan				
03.01	Penerimaan Pembiayaan daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.745.000.000,00	3.745.000.000,00	-	-
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-	-
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Neto	36.255.000.000,00	36.255.000.000,00	-	-

Anggaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan anggaran induk.

4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

4.2.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.561.741.927.097,72	1.482.950.696.123,48	(78.791.230.974,24)	94,95
2	Belanja	1.597.996.927.097,72	1.480.600.620.458,56	(117.396.306.639,16)	92,65
	Surplus/(Defisit)	(36.255.000.000,00)	2.350.075.664,92	38.605.075.664,92	(6,48)
3	Pembiayaan				
A	Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	122.206.950.385,22	82.206.950.385,22	305,52
B	Pengeluaran Pembiayaan	3.745.000.000,00	3.730.872.917,64	(14.127.082,36)	99,62
	Pembiayaan Neto	36.255.000.000,00	118.476.077.467,58	82.221.077.467,58	326,79
	SILPA	0,00	120.826.153.132,50	120.826.153.132,50	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab VI, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

4.2.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
I	Pendapatan	1.482.950,69	1.525.935,90	1.462.024,35	1.367.577,57	1.248.392,02
II	Belanja	1.480.600,62	1.506.221,68	1.450.826,44	1.351.846,28	1.164.216,36
Surplus/Defisit		2.350,07	19.714,22	11.197,91	15.731,29	84.175,66
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	122.206,95	125.239,94	142.694,80	155.856,07	101.416,98
2	Pengeluaran	3.730,87	22.771,07	28.248,37	28.726,38	29.748,37
Pembiayaan Netto		118.476,08	102.468,87	114.446,43	127.129,69	71.668,61
SILPA		120.826,15	122.183,09	125.644,34	142.860,98	155.844,27

4.2.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2014 sampai 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
1	Pajak Daerah	91.995,24	96.850,26	117.782,19	139.626,19	138.541,75
2	Retribusi Daerah	13.199,32	12.590,47	15.984,98	14.255,16	13.022,20
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750,65	11.519,62	13.592,31	13.535,06	17.064,08
4	Lain-lain PAD yang sah	84.416,81	77.703,32	85.284,54	75.709,51	70.796,97
Jumlah		200.362,02	198.663,67	232.644,01	243.125,92	239.425,00

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017. Pajak Daerah dari tahun anggaran 2014 hingga 2018 secara umum mengalami penurunan terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun untuk jenis pajak daerah yang lain mengalami peningkatan realisasi penerimaannya yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah dan membaiknya kondisi pariwisata. Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan bunga deposito, komisi atas aset Pemerintah Provinsi Bali, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, pendapatan dari pengembalian atas pelaksanaan

kegiatan, pendapatan denda, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dana kapitasi JKN dan hasil pengelolaan investasi non permanen.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima Sumbangan dari Masyarakat yang ditujukan sebagai dana tanggap darurat serta penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung.

4.2.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2018 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
1	Belanja Operasi	1.155.238,91	1.093.006,80	1.088.388,73	1.032.815,77	910.375,33
2	Belanja Modal	144.906,76	237.069,89	190.437,98	178.424,64	177.557,76
3	Belanja Tak Terduga	2.562,22	826,04	163,68	584,26	-
4	Belanja Transfer	177.892,73	175.318,95	171.836,05	140.021,60	76.283,27
Jumlah		1.480.600,62	1.506.221,68	1.450.826,44	1.351.846,28	1.164.216,36

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang yang didalamnya terdapat barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, hibah kepada masyarakat, dan bantuan sosial kepada masyarakat, belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2018 namun tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana demi kenyamanan masyarakat demikian pula belanja tak terduga meningkat yang digunakan untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana serta pengembalian pendapatan tahun sebelumnya.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

4.2.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
1	Penerimaan	122.206,95	125.239,94	142.694,80	155.856,07	101.416,98
2	Pengeluaran	3.730,87	22.771,07	28.248,37	28.726,38	29.748,37

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini /dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

4.2.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

4.2.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{200.362.025.514,55}{1.480.600.620.458,56} \times 100\% = 13,53\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 13,53% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

4.2.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{200.362.025.514,55}{1.155.238.912.468,07} \times 100\% = 17,34\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 17,34%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

4.2.3.3 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja}} = \frac{221.321.782.877,55}{1.480.600.620.458,56} \times 100\% = 14,95\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 14,95%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut

sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

4.2.3.4 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{221.321.782.877,55}{1.155.238.912.468,07} \times 100\% = 19,16\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 19,16%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	
						Realisasi	Target
1	PAD	15,64	17,98	16,03	13,19	13,53	14,64
	Belanja						
2	PAD	19,76	21,02	18,66	18,18	17,34	19,03
	Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan menurun dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan kondisi luar biasa erupsi Gunung Agung yang terjadi di Kabupaten Karangasem yang masih berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Khusus Tahun 2018, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 14,64% untuk menopang belanja dan 19,03% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 13,53% dan 17,34%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2018 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2018 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2018. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan.

Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab VI.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang akan dilakukan dalam Tahun 2018 adalah:

- 1) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas potensi pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Karangasem;
- 2) Memberikan stimulan/rangsangan kepada wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu dengan pemberian hadiah;
- 3) Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan;
- 5) Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan;
- 6) Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek pendapatan baru; dan
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 juga telah mengalami perubahan.

5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
- 2) Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
- 3) Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
- 4) Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
- 5) Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
- 6) Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- 7) Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan;
- 8) Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018; dan
- 9) Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah

pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

5.2.1 Pendapatan – LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 3) Pendapatan-LO dilaksan akan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
- 5) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

5.2.2 Pendapatan – LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- 2) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- 5) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
- 6) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.

- 7) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

5.2.3 Beban – LO

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saatterjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 4) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

5.2.4 Belanja - LRA

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
- 3) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
- 4) Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 6) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
- 7) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.2.5 Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 4) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- 5) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
- 6) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- 7) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 8) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.2.6 Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- 2) Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
- 3) Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
- 5) Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;

- 6) Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
- 7) Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 8) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
- 9) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

5.2.7 Aset/Aktiva

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
- 2) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.2.7.1 Aset Lancar

- 1) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 2) Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
- 3) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 4) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
- 5) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
- 6) Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya.
- 7) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
- 8) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
- 9) Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut.

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

- 10) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 11) Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain; dan
- 12) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

5.2.7.2 Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
- 3) Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- 4) Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
- 5) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*)

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

- 6) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

5.2.7.3 Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
- 3) Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
- 4) Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- 5) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
- 6) Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- 7) Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
- 8) Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
- 9) Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
- 10) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
- 11) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- 12) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
- 13) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
- 14) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
- 15) Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;

- 16) Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
- 17) Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
- 18) Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan
- 19) Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
- 20) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi; dan
- 21) Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

5.2.7.4 Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
- 2) Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

5.2.7.5 Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
- 2) Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
- 3) Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
- 5) Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;

- 6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya;
- 7) Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca;

5.2.8 Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- 2) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- 3) Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
- 4) Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
- 5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- 6) Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- 7) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- 8) Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
- 9) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 10) Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
- 11) Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
- 12) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

5.2.9 Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
- 2) Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

5.2.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

- 1) Nilai perolehan Aset Tetap yang masih 0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
- 2) Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2018, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat(Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

- 3) Pada tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk Tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- 4) Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan Tahun 2018 dihitung sebagai berikut.

$$\text{Penyusutan 2018} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \text{penyusutan per periode} : 12$$

$$\text{Nilai penyusutan pada tahun berkenaan} = \text{penyusutan per bulan} \times \text{bulan kepemilikan aset tetap.}$$

- 5) Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2018 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
- 6) Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

BAB VI
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

6.1 Penjelasan Pos Neraca

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1 Aset	Rp1.483.255.523.263,59	Rp1.543.062.430.875,70

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Aset Lancar	Rp 214.171.033.944,22	Rp 195.368.290.118,89
- Investasi Jangka Panjang	Rp 116.336.793.443,73	Rp 104.049.025.463,37
- Aset Tetap	Rp 1.140.014.831.382,66	Rp 1.231.346.825.291,29
- Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00
- Aset Lainnya	Rp 12.732.864.492,98	Rp 12.298.290.002,15
Jumlah Aset	Rp 1.483.255.523.263,59	Rp 1.543.062.430.875,70

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1 Aset Lancar	Rp214.171.033.944,22	Rp195.368.290.118,89

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah	Rp 104.396.111.251,41	Rp 107.201.056.359,84
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 92.065.976,86	Rp 88.108.990,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp 100.735.375,50	Rp 2.926.579.789,00
- Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp 11.958.056.410,83	Rp 8.831.301.662,33
- Kas di Bendahara BOS	Rp 1.187.155.341,03	Rp 1.793.348.663,70
- Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp 0,00	Rp 50.000,00
- Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp 3.092.028.776,87	Rp 1.342.644.673,84
- Piutang	Rp 78.286.208.039,39	Rp 59.656.861.919,05
- Belanja Dibayar Dimuka	Rp 103.305.833,35	Rp 23.720.833,33
- Persediaan	Rp 14.955.366.938,98	Rp 13.504.617.227,80
Jumlah Aset Lancar	Rp 214.171.033.944,22	Rp 195.368.290.118,89

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp104.396.111.251,41	Rp107.201.056.359,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017 yang berada di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp 107.201.056.359,84	Rp 118.968.370.356,36
- Mutasi kredit rekening	Rp 1.350.053.395.682,27	Rp 1.401.787.032.355,48
- Mutasi debit rekening	Rp (1.352.858.340.790,70)	Rp (1.413.554.346.352,00)
- Saldo Akhir	Rp 104.396.111.251,41	Rp 107.201.056.359,84

Saldo akhir Kas di Kas Daerah tersebut diatas telah tertuang dalam Rekonsiliasi Bank antara Bank BPD Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai BUD dan SKPKD per 31 Desember 2018.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00
Tidak terdapat saldo pada rekening bank dan dipegang secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran OPD.		

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp92.065.976,86	Rp88.108.990,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang terdiri dari:		

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag	Rp Rp17.267.000,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Ketenagakerjaan	Rp 2.961,86	
- Kas di Bendahara Penerimaan BLU RSUD Karangasem	Rp 40.508.615,00	Rp 77.260.490,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang 1	Rp 1.522.000,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang 2	Rp 1.483.000,00	Rp 409.500,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem 1	Rp 502.500,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem 2	Rp 379.000,00	Rp 1.102.500,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis 1	Rp 648.500,00	Rp 1.332.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis 2	Rp 707.000,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu 1	Rp 6.403.500,00	Rp 352.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu 2	Rp 875.000,00	Rp 10.000,00
- Puskesmas Sidemen	Rp 3.411.000,00	
- Puskesmas Bebandem	Rp 1.792.000,00	
- Puskesmas Rendang	Rp 5.271.900,00	
- Puskesmas Selat	Rp 2.289.000,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama	Rp <u>9.003.000,00</u>	Rp <u>7.642.500,00</u>
- Saldo Akhir	Rp 92.065.976,86	Rp 88.108.990,00

Saldo kas di bendahara penerimaan disebabkan pelayanan pasar, RSUD dan puskesmas masih berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2018 dan pihak bank tidak melayani transaksi tunai pada tanggal tersebut.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	Rp100.735.375,50	Rp2.926.579.789,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLU RSUD Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Jumlah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran BLU RSUD Kabupaten Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di BLU RSUD Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Saldo awal	Rp 2.926.579.789,00	Rp 3.131.930.393,54
- Pendapatan BLUD	Rp 56.169.486.335,50	Rp 53.911.213.932,46
- Belanja BLUD	Rp (58.995.330.749,00)	Rp (54.116.564.537,00)
- Saldo Akhir	Rp 100.735.375,50	Rp 2.926.579.789,00

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.5 Kas di Bendahara JKN	Rp11.958.056.410,83	Rp8.831.301.662,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas - Puskesmas di Kabupaten Karangasem sebagai penampung dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian transaksi atas Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Saldo awal	Rp 8.831.301.662,33	Rp 1.541.936.233,38
- Pendapatan FKTP	Rp 19.333.151.500,00	Rp 16.252.337.700,00
- Belanja FKTP	Rp (16.206.396.751,50)	Rp (8.957.972.271,05)
- Saldo akhir Kas di Bendahara JKN	Rp 11.958.056.410,83	Rp 8.836.301.662,33
- Pembayaran Utang kepada rekanan	Rp	Rp 5.000.000,00
- Saldo Akhir	Rp 11.958.056.410,83	Rp 8.831.301.662,33

Rincian kas di Bendahara JKN dapat dilihat pada *lampiran 1*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	Rp1.187.155.341,03	Rp1.793.348.663,70

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per tanggal 31 Desember 2018. Rincian transaksi Kas di Bendahara BOS sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp 1.793.348.663,70
- Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	Rp 1.190.267,43
- Saldo awal setelah koreksi	Rp 1.794.538.931,13
- Alokasi Dana BOS	Rp 55.602.920.000,00
- Pendapatan Lain – lain	Rp 60.836.774,00
- Bunga Bank 2018 yang belum disetor	Rp 29.553,96
- Belanja BOS	Rp (56.271.425.085,00)
- Kas di Bendahara BOS yang disetor ke kasda	Rp (520.767,34)
- Koreksi atas lebih/kurang catat jasa giro	Rp 775.934,28
- Saldo Akhir	Rp 1.187.155.341,03

Saldo akhir Kas Bos pada masing – masing sekolah masih tersimpan pada rekening bank sebesar Rp1.011.643.712,14 serta dipegang tunai oleh Bendahara sebesar Rp175.511.628,89. Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Terdapat perbedaan penyajian saldo Kas Bendahara BOS SMP Satu Atap Bunutan sebesar Rp19.608.000,00 antara Laporan Keuangan dengan bukti pendukung (saldo Rekening Tabungan Per 31 Desember 2018 dan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara BOS) dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Rekening Tabungan + Uang Tunai	Rp	19.822.759,23
- Penyajian di Laporan Keuangan	Rp	<u>214.759,23</u>
Selisih	Rp	19.608.000,00

Selisih sebesar Rp19.608.000,00 merupakan jumlah uang yang ditransfer Pihak Sekolah kepada CV STAR RI pada tanggal 27 Nopember 2017 atas belanja LKS. Namun karena kesalahan teknis Pihak Bank, uang sejumlah Rp19.608.000,00 ditransfer kembali kepada Pihak Sekolah pada tanggal 27 Nopember 2017. Pihak Sekolah belum mentransfer uang sejumlah Rp19.608.000,00 kepada CV STAR RI selama tahun 2018.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.7 Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp0,00	Rp50.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Kas tersebut ditampung dalam rekening Peduli Gunung Agung Karangasem dengan nomor rekening tabungan 022.02.02.44480-8 sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 575/HK/2017 tentang Penetapan Rekening Bank Peduli Gunung Agung Karangasem pada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2017. Selama tahun 2018 jumlah sumbangan masyarakat untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung sebesar Rp1.697.105.535,85 dicatat dalam Pendapatan Lainnya Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian transaksi Kas di Peduli Gunung Agung sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
- Saldo Awal	Rp	50.000,00		0,00
- Penerimaan Sumbangan Masyarakat	Rp	1.697.105.535,85	Rp	3.026.830.966,74
- Transfer ke Kas Daerah			Rp	(1.684.372.103,00)
- Transfer ke Rekening Bendahara Penanggulangan Bencana di BPBD	Rp	(1.697.131.535,85)	Rp	(1.342.408.863,74)
- Beban denda administrasi	Rp	(24.000,00)		
- Saldo Akhir	Rp	0,00	Rp	50.000,00

Untuk kelancaran penanganan pengungsi erupsi Gunung Agung dan penanganan tanggap darurat bencana berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Forkopinda Kabupaten Karangasem Nomor 400/1806/Hanbang/BKBPPM tanggal 19 Desember 2017 dilakukan *auto debet* dari Rekening Peduli Gunung Agung ke rekening Bendahara Penanggulangan Bencana atas dana sumbangan yang masuk.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.8 Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp3.092.028.776,87	Rp1.342.644.673,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Saldo Awal	Rp 1.342.644.673,84	
- Sumbangan masyarakat untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Agung yang ditransfer dari Rekening Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp 1.697.131.535,85	Rp 1.342.408.863,74
- Bunga Bank	Rp 52.252.567,18	Rp 235.810,10
- Saldo akhir	Rp 3.092.028.776,87	Rp 1.342.644.673,84

Kas tersebut ditampung dalam rekening dengan nomor rekening tabungan 022.02.02.44639-9 sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 749/HK/2017 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Desember 2017.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9 Piutang	Rp78.286.208.039,39	Rp59.656.861.919,05

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9.1 Piutang Pajak	Rp62.542.947.064,74	Rp58.445.521.641,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang sudah diterbitkan ketetapan pajak namun belum terealisasi pembayarannya. Didalam piutang pajak tersebut terdapat piutang pajak PBB-P2 yang terjadi permasalahan setelah pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama Gianyar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Terbit SPPT ganda dimana objek pajaknya satu tetapi ketetapannya terbit *double*, hal ini terjadi pada daerah-daerah yang terjadi pemekaran.
- Terbit SPPT untuk obyek yang dikategorikan sebagai fasilitas umum (FASUM) seperti untuk kepentingan pendidikan serta perkantoran.
- Terbit SPPT an. PEMILIK yang tidak jelas siapa wajib pajaknya dengan ketetapan jumlah pajak terhutang yang tidak pernah ada pembayaran sama sekali.
- Terbit SPPT yang ada nama wajib pajaknya namun oleh wajib pajak tidak mengakui memiliki objek pajak tersebut dalam hal ini khusus untuk daerah yang masih SISTEP (belum ada peta objek pajak).
- Masih munculnya konfirmasi piutang dari Wajib Pajak dalam SIM PBB-P2 dengan diterbitkannya informasi data pembayaran PBB-P2, namun Wajib Pajak menyatakan telah membayar dengan melakukan penyetoran pajak terutang dengan melampirkan bukti pembayaran.

Atas permasalahan tersebut beberapa tindakan penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem adalah:

- Pelaksanaan pembatalan SPPT terhadap SPPT ganda, SPPT FASUM, SPPT an.PEMILIK yang tidak jelas objek dan wajib pajaknya yang terus terbit setiap tahun dengan mengacu kepada Keputusan Bupati Karangasem Nomor 565/HK/2017 tentang Penetapan Mekanisme

Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karangasem.

- Penerbitan Surat Keterangan Lunas, dimana banyak piutang yang muncul walaupun telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak (ada bukti pembayarannya) sehingga diperlukan penerbitan Surat Keterangan Lunas melalui verifikasi berkas pembayaran berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2013.
- Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karangasem.

Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 3*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9.2 Penyisihan Piutang Pajak	(Rp24.657.538.832,85)	(Rp21.062.880.786,16)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang diperkirakan tak tertagih. Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9.3 Piutang Retribusi	Rp102.995.013,00	Rp100.078.778,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017, yang sudah diterbitkan ketetapannya namun belum terealisasi pembayarannya. Rincian piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 3*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9.4 Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp1.029.950,13)	(Rp10.977.658,31)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang diperkirakan tak tertagih. Rincian perhitungan penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.9.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada Tahun 2018 terdapat kasus kerugian daerah hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem yang belum ditindaklanjuti oleh Obyek Pemeriksaan sebesar Rp3.457.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja	: Rp 60.000,00
- Dinas Pertanian	: Rp1.428.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	: Rp 94.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	: Rp 476.000,00
- Bagian Kesra Sekretariat Daerah	: <u>Rp1.399.000,00</u>
Jumlah	: Rp3.457.000,00

Atas kerugian daerah sebesar Rp3.457.000,00 belum ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sehingga tidak bisa diakui sebagai piutang (Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi) Tahun 2018.

6.1.1.1.9.6	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
--------------------	---	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017.

6.1.1.1.9.7	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	<u>Tahun 2018</u> Rp11.296.921.584,45	<u>Tahun 2017</u> Rp8.962.032.741,47
--------------------	---	--	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017, dengan perincian sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	5.248.673.597,43	Rp	4.131.401.589,08
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	2.804.117.338,12	Rp	2.330.080.010,13
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	3.130.422.992,42	Rp	2.271.988.515,41
- Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP)	Rp	30.186.754,63	Rp	37.348.157,93
- Pajak Rokok	Rp	83.520.901,85	Rp	191.214.468,92
Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp	11.296.921.584,45	Rp	8.962.032.741,47

6.1.1.1.9.8	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	<u>Tahun 2018</u> (Rp112.969.215,84)	<u>Tahun 2017</u> (Rp89.620.327,41)
--------------------	--	---	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian perhitungan penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada *lampiran 5*.

6.1.1.1.9.9	Piutang lainnya	<u>Tahun 2018</u> Rp29.782.419.552,54	<u>Tahun 2017</u> Rp13.715.394.053,20
--------------------	------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada *lampiran 4*.

6.1.1.1.9.10	Penyisihan Piutang lainnya	<u>Tahun 2018</u> Rp(667.537.176,52)	<u>Tahun 2017</u> (Rp402.686.523,48)
---------------------	-----------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *lampiran 5*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.10 Belanja Dibayar Dimuka	Rp103.305.833,35	Rp23.720.833,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian Belanja Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran6*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.1.11 Persediaan	Rp14.955.366.938,98	Rp13.504.617.227,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Persediaan dimaksud merupakan Bahan Habis Pakai/Material yang terdiri dari alat tulis kantor, barang cetakan, barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, barang kuasi (karcis), material/bahan (termasuk didalamnya bibit hewan dan obat-obatan), bahan makanan pokok (sembako) dan peralatan/perlengkapan (termasuk didalamnya alat rumah tangga, alat listrik dan lain-lain). Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran7*.

Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem. Namun pada Dinas Kesehatan metode tersebut baru bisa diterapkan pada Tahun 2017 karena Peraturan Bupati Karangasem No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 3 Mei 2016. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Propinsi Bali pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp188.593.875,00. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlakuyang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	DPM & PTSP	Plat IMB	300.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Karcis retribusi sampah	2.405.205,00
3	Dinas Pariwisata	Karcis retribusi tempat wisata Tulamben dan Padangbai (rusak)	1.099.400,00
4	Disdukcapil	Cetakan	101.662.792,00
Jumlah			105.467.397,00

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 plat dengan nilai sebesar Rp300.000,00. Persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku telah dikeluarkan dari neraca 31 Desember 2018.

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman persediaan Karcis Retribusi Sampah sebanyak 53.449 lembar senilai Rp2.405.205,00 yang kondisinya kedaluwarsa/rusak telah dikeluarkan dari persediaan neraca disebabkan perubahan tarif retribusi namun belum dimusnahkan.

Pada Dinas Pariwisata terdapat enam jenis karcis masuk tempat wisata yang sudah rusak sebesar Rp1.099.400,00 namun belum dimusnahkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Persediaan Karcis yang Rusak pada Dinas Pariwisata

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah karcis (lembar)	harga/lembar	Nilai
1.	Karcis Tulamben			
	- WNA Anak	1.900	239,00	454.100,00
	- WNI Dewasa	300	239,00	71.700,00
	- WNI Anak	400	239,00	95.600,00
2.	Karcis Padang Bai			
	- WNI Dewasa	400	239,00	95.600,00
	- WNI Anak	1.600	239,00	382.400,00
Jumlah				1.099.400,00

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat barang cetakan atas dokumen catatan sipil yang tidak berlaku sesuai Permendagri No 118 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp101.662.792,00 yang sudah dikeluarkan dari persediaan namun belum dihapuskan.

6.1.1.2 Investasi Jangka Panjang Tahun 2018 Rp116.336.793.443,73 Tahun 2017 Rp104.049.025.463,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri dari:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
- Investasi Non Permanen	Rp	7.541.994.453,00	Rp	0,00
- Investasi Permanen	Rp	108.794.798.990,73	Rp	104.049.025.463,37
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	116.336.793.443,73	Rp	104.049.025.463,37

6.1.1.2.1 Investasi Non Permanen Tahun 2018 Rp7.541.994.453,00 Tahun 2017 Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017 yang terdiri dari:

- Dana Bergulir	Rp	267.549.150,00	Rp	290.219.129,08
- Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(267.549.150,00)	Rp	(290.219.129,08)
- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	11.432.236.519,00	Rp	11.432.236.519,00
- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	(3.890.242.066,00)	Rp	(11.432.236.519,00)
Jumlah Investasi Non Permanen	Rp	7.541.994.453,00	Rp	0,00

Tahun 2018

Tahun 2017

6.1.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir **Rp267.549.150,00** **Rp290.219.129,08**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2018 yang bersumber dari APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui dinas/instansi terkait, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Saldo Dana Bergulir merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada Tahun 2009. Sejak Tahun 2010 Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna dana bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga dana bergulir yang diberikan menjadi macet.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam LHP Nomor 700.04/31/ITPROV tanggal 26 Juli 2010, sisa kas dana bergulir yang ditampung dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem sejumlah Rp41.428.931,00 disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 30 Desember 2010. Selanjutnya pengembalian tunggakan pada Tahun 2011 sebesar Rp18.457.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp19.050.000,00, Tahun 2013 sebesar Rp8.122.222,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.007.544,00, Tahun 2015 sebesar Rp11.800.000,00, Tahun 2016 sebesar Rp9.507.000,00, Tahun 2017 sebesar Rp51.480.977,00 serta tahun 2018 sebesar Rp22.669.979,08 langsung disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal permintaan keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan No. 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00.

Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 16 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2017 proses tersebut masih berlangsung dan belum diterbitkan rekomendasi penghapusan Dana Bergulir.

Atas saldo dari piutang tersebut telah dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih menurut *aging schedule* sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karangasem.

6.1.1.2.1.2 Penyisihan Investasi Dana Bergulir **Tahun 2018** **Tahun 2017**
(Rp267.549.150,00) **(Rp290.219.129,08)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Investasi Dana Bergulir di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2018 dan 2017. Penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014, dimana investasi non

permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.2.1.3 Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp11.432.236.519,00	Rp11.432.236.519,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun.

Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akte Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemda Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah di tetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem.

Perjanjian Kerjasama pembagian hasil pengelolaan bersama diatur dalam akte notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dimana ketentuannya:

- Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.

Pada Tahun 2018, pihak Pemda Karangasem telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp1.509.810.570,91. Seluruh pembagian keuntungan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 28 Pebruari 2019.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.2.1.4 Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	(Rp3.890.242.066,00)	(Rp11.432.236.519,00)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan atas investasi non permanen dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung per 31 Desember 2018 dan 2017. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan perubahan kebijakan akuntansi yaitu Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang berpengaruh terhadap nilai penyisihan investasi dalam proyek pembangunan Taman Ujung. Penyisihan investasi diperhitungkan dari penyetoran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Ujung yang mengurangi nilai investasi.

Sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali**Rp38.300.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali per 31 Desember 2018 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT BPD Bali sebesar 2,14% dari keseluruhan modal PT BPD Bali. Penyertaan pada BPD Bali sebesar Rp38.300.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahamkan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00. Nilai tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan tanggal 20 April 2018 yang dicatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 42 tanggal 20 April 2018 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-59/KR.08/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor.

Atas penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp10.045.206.116,30 atas deviden Tahun Buku 2017.

PDAM Kabupaten Karangasem**Rp69.419.798.990,73**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PDAM Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar 100% dari modal keseluruhan PDAM.

Pada Tahun 2018 terjadi penambahan Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp2.100.000.000,00 dari Rp58.000.547.648,68 pada Tahun 2017 menjadi Rp60.100.547.648,68 berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sebesar Rp2.100.000.000,00. Penambahan juga terjadi pada Cadangan dana sosial dan pendidikan sebesar Rp254.903.649,95 serta laba/rugi PDAM Tahun berjalan sebesar Rp1.103.427.778,07. Laporan keuangan PDAM Tahun Buku 2017 diaudit oleh KAP K. GUNARSA dengan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM per 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan SAK ETAP.

Komposisi ekuitas pada laporan keuangan PDAM *unaudited* tersebut sebagai berikut:

- Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	Rp60.100.547.648,68
- Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp5.680.195.396,00
- Modal Hibah	Rp1.245.250.466,00
- Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	Rp3.161.403.444,64
- Cadangan Umum	Rp2.906.499.794,69
- Akumulasi kerugian PDAM s.d. Tahun Lalu	(Rp5.839.485.886,57)
- Laba/Rugi PDAM Tahun Berjalan (<i>audited</i>)	Rp2.165.388.127,29
Nilai Investasi pada PDAM Karangasem	Rp69.419.798.990,73

Atas penyertaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangsem pada TA 2018 telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp700.985.037,37 yang ditransfer oleh PDAM Karangasem pada tanggal 31 Desember 2018 ke Rekening Kas Daerah. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada Surat Bupati Karangasem Nomor 900/3557/EK/Setda tanggal 23 Nopember 2018 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih PDAM. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2017 berdasarkan Laporan Auditor KAP K. GUNARSA sebesar Rp1.274.518.249,76 dikalikan 55% sesuai dengan ketentuan diatas.

PT. Jamkrida Bali Mandara

Rp1.075.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2018. Penyertaan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, penambahan penyertaan modal pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,00 serta Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,00.

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp4.459.590,00 yang diterima di Kasda pada tanggal 30 April 2018.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.3 Aset Tetap	Rp1.140.014.831.382,66	Rp1.231.346.825.291,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
- Tanah	Rp	185.010.430.857,25	Rp	185.010.430.857,25
- Peralatan dan Mesin	Rp	409.599.629.865,14	Rp	380.532.215.997,07
- Gedung dan Bangunan	Rp	770.146.635.249,86	Rp	728.732.289.259,81
- Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.179.328.458.482,14	Rp	1.111.881.990.004,59

- Aset Tetap Lainnya	Rp	44.926.596.376,00	Rp	40.100.293.900,98
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	6.924.847.526,00	Rp	4.919.283.926,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.455.921.766.973,73)	Rp	(1.219.829.678.654,41)
Jumlah Aset Tetap	Rp	1.140.014.831.382,66	Rp	1.231.346.825.291,29

Pada Tahun 2018 telah dilakukan koreksi atas pencatatan Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca atas:

1. Nilai aset tetap yang berada dibawah nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi dikeluarkan dari daftar aset tetap OPD dan dipisahkan dalam buku *extracomptable*;
2. Nilai aset tetap yang diperoleh setelah pengeluaran awal/renovasi/perbaikan/*overhaul* yang dicatat secara terpisah sudah dilakukan kapitalisasi terhadap aset induknya sehingga terjadi koreksi nilai penyusutan atas penerapan kebijakan akuntansi untuk aset jenis ini;
3. Penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan sehingga terjadi koreksi atas nilai penyusutan aset tetap.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.3.1 Tanah	Rp185.010.430.857,25	Rp185.010.430.857,25

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
Saldo Awal	Rp 185.010.430.857,25	Rp 181.910.839.355,50
Mutasi Tambah:		
- Kapitalisasi	Rp 0,00	Rp 4.564.316.501,75
- Mutasi masuk antar OPD	Rp 0,00	Rp 10.089.019.080,00
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	Rp (1.365.000.000,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp 0,00	Rp (10.089.019.080,00)
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	Rp 0,00	Rp (99.725.000,00)
Saldo Akhir	Rp 185.010.430.857,25	Rp 185.010.430.857,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah untuk masing-masing Unit Pengguna Barang dapat dilihat pada *lampiran 8*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp409.599.629.865,14	Rp380.532.215.997,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
Saldo Awal	Rp 380.532.215.997,07	Rp 339.793.223.647,87
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp 34.207.855.565,05	Rp 47.643.769.912,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp 0,00	Rp 87.020.500,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp 803.797.203,00	Rp 593.198.692,00

- Penerimaan Hibah	Rp	3.328.740.146,00	Rp	4.135.599.450,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	25.592.000,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	1.311.475.500,00	Rp	25.575.284.055,00
- Koreksi pencatatan	Rp	122.465.580,00	Rp	459.925.115,04
Mutasi Kurang:				
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(39.921.500,00)	Rp	(49.849.936,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(19.486.000,00)	Rp	(1.134.076.775,08)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(0,10)	Rp	(2.938.085.020,00)
- Kebijakan <i>Extracomptable</i>	Rp	(9.336.037.125,88)	Rp	(8.084.101.588,76)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(1.311.475.500,00)	Rp	(25.575.284.055,00)
Saldo Akhir	Rp	409.599.629.865,14	Rp	380.532.215.997,07

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 9*.

6.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan **Tahun 2018** **Tahun 2017**
Rp770.146.635.249,86 **Rp728.732.289.259,81**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
Saldo Awal	Rp	728.732.289.259,81	Rp	653.990.016.583,23
Mutasi Tambah:				
- Belanja Modal	Rp	26.449.987.947,02	Rp	60.248.410.581,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	11.264.556.992,00	Rp	11.034.146.094,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	205.031.000,00	Rp	5.028.365.142,19
- Penerimaan Hibah	Rp	5.711.251.000,00	Rp	12.642.232.943,29
- Kapitalisasi	Rp	153.800.000,00	Rp	1.771.084.474,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	847.616.000,00	Rp	71.309.416.139,66
- Koreksi pencatatan	Rp	99.736.000,11	Rp	116.956.485,00
Mutasi Kurang:				
- Penghapusan	Rp	(583.236.400,00)	Rp	(651.699.165,00)
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(572.793.203,00)	Rp	(382.498.018,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(19.976.000,00)	Rp	(777.671.000,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(690.631.000,08)	Rp	(13.043.847.790,00)
- Kebijakan <i>extracomptable</i>	Rp	(603.380.346,00)	Rp	(1.243.207.069,90)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(847.616.000,00)	Rp	(71.309.416.139,66)
Saldo Akhir	Rp	770.146.635.249,86	Rp	728.732.289.259,81

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 10*.

6.1.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **Tahun 2018** **Tahun 2017**
Rp1.179.328.458.482,14 **Rp1.111.881.990.004,59**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset

Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>	
Saldo Awal	Rp	1.111.881.990.004,59	Rp	1.025.249.503.645,70
Mutasi Tambah:				
- Belanja Modal	Rp	68.651.037.477,65	Rp	111.925.459.217,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	1.329.336.000,00	Rp	1.498.906.544,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	0,00	Rp	99.327.000,00
- Hibah				
- Kapitalisasi	Rp	33.718.000,00	Rp	29.895.000,00
- Utang Belanja	Rp	8.580.000,00		
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	0,00	Rp	1.108.305.718,00
Mutasi Kurang:				
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(829.430.000,00)	Rp	(412.911.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(49.566.000,00)	Rp	(28.936.573.601,99)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(1.697.207.000,10)	Rp	(26.091.495.625,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(0,00)	Rp	(1.108.305.718,00)
Saldo Akhir	Rp	1.179.328.458.482,14		1.111.881.990.004,59

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

6.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Rp44.926.596.376,00 Tahun 2017 Rp40.100.293.900,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>	
Saldo Awal	Rp	40.100.293.900,98	Rp	35.170.716.869,98
Mutasi Tambah:				
- Belanja Modal	Rp	15.597.881.967,00	Rp	17.252.246.653,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	24.740.000,00	Rp	24.584.896,00
- Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp	30.000,00
- Hibah	Rp	0,00	Rp	98.923.200,00
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	0,00	Rp	365.055.000,00
- Koreksi pencatatan	Rp	0,02	Rp	480.000,00
Mutasi Kurang:				
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(10.790.919.492,00)	Rp	(11.048.356.218,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(5.400.000,00)	Rp	(4.562.000,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	Rp	(1.393.769.500,00)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(0,00)	Rp	(365.055.000,00)
Saldo Akhir	Rp	44.926.596.376,00	Rp	40.100.293.900,98

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 12*.

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp6.924.847.526,00		Rp4.919.283.926,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Rincian mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
Saldo Awal	Rp	4.919.283.926,00	Rp	3.716.599.980,00
Mutasi Tambah:				
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	94.428.000,00	Rp	125.966.000,00
- Kapitalisasi	Rp	3.100.501.600,00	Rp	2.693.176.000,00
- Mutasi masuk antar OPD	Rp	0,00	Rp	223.336.000,00
Mutasi Kurang:				
- Mutasi keluar antar OPD	Rp	(0,00)	Rp	(223.336.000,00)
- Koreksi ke Persediaan	Rp	(0,00)	Rp	(9.935.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(0,00)	Rp	(223.336.000,00)
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(1.189.366.000,00)	Rp	(1.383.187.054,00)
Saldo Akhir	Rp	6.924.847.526,00	Rp	4.919.283.926,00

Rincian mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 13*.

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
6.1.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(Rp1.455.921.766.973,73)		(Rp1.219.829.678.654,41)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017. Akumulasi Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan nilai residu.

Untuk Tahun 2018, terdapat penyesuaian nilai penyusutan dilakukan dengan berlakunya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 29 Nopember 2018 karena diterapkannya penyusutan atas aset tetap dilakukan secara bulanan. Sehingga dalam penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan terdiri dari penyesuaian nilai akumulasi penyusutan untuk perubahan kebijakan sebagaimana telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas (5.2). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

		<u>Tahun 2018</u>		<u>Tahun 2017</u>
Saldo Awal	Rp	1.219.829.678.654,41	Rp	1.082.107.227.126,04
Mutasi Tambah:				
- Beban Penyusutan	Rp	113.268.830.581,53	Rp	133.370.223.157,38
- Reklasifikasi dari aset tetap	Rp	0,00	Rp	84.205.000,00
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp	205.031.000,00	Rp	5.156.256.922,19
- Penerimaan Hibah	Rp	488.788.083,00	Rp	16.354.789.069,92
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	725.529.367,36
- Koreksi Pencatatan	Rp	134.001.163.951,15	Rp	24.978.192.175,22
- Mutasi Masuk antar OPD	Rp	1.178.637.230,00	Rp	31.069.486.656,38

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(0,00)	Rp	(9.989.000,00)
- Reklasifikasi ke aset lain - lain	Rp	(0,00)	Rp	(27.209.541.732,06)
- Penghapusan	Rp	(567.841.072,00)	Rp	(535.148.785,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(4.017.407.771,74)	Rp	(8.958.372.301,07)
- Kebijakan <i>extracomptable</i>	Rp	(7.286.476.452,62)	Rp	(6.272.092.345,57)
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	(1.178.637.230,00)	Rp	(31.031.086.656,38)
Saldo Akhir	Rp	1.455.921.766.973,73	Rp	1.219.829.678.654,41

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap OPD dapat dilihat pada *lampiran 14*.

6.1.1.4	Dana Cadangan	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.1.5	Aset Lainnya	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
		Rp12.732.864.492,98	Rp12.298.290.002,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

		<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	0,00	Rp 0,00
- Tuntutan Ganti Rugi	Rp	0,00	Rp 0,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp 0,00
- Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00	Rp 0,00
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00	Rp 0,00
- Aset Lain-Lain	Rp	12.732.864.492,98	Rp 12.298.290.002,15
Jumlah Aset Lainnya	Rp	12.732.864.492,98	Rp 12.298.290.002,15

6.1.1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan penjualan secara angsuran atas sepeda motor kepada dua orang Kepala Desa pada Tahun 2002 sebesar Rp1.120.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2018) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp1.120.000,00 - Rp1.120.000,00).

6.1.1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
------------------	--------------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.1.5.4	Aset Tidak Berwujud	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
------------------	----------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.1.5.5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
------------------	---------------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.1.5.6	Aset Lain-Lain	<u>Tahun 2018</u> Rp12.732.864.492,98	<u>Tahun 2017</u> Rp12.298.290.002,15
------------------	-----------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri dari:

- Ternak Guliran dan Tanaman	Rp	2.015.034.366,00	Rp	2.015.034.366,00
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	Rp	4.256.299.522,47	Rp	4.702.686.643,31
- Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	Rp	5.524.651.737,83	Rp	4.643.690.126,16
- Aset Tetap akan dihapuskan selain Rusak Berat	Rp	695.234.666,67	Rp	695.234.666,67
- Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut	Rp	241.644.200,00	Rp	241.644.200,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp	12.732.864.492,98	Rp	12.298.290.002,15

Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak yang direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2018 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2018) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp940.631.736,44 - Rp940.631.736,44). Rincian Piutang Pajak yang akan Dihapuskan dapat dilihat pada *lampiran 15*.

Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung**Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2018) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp13.040.000,00 - Rp13.040.000,00)

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 Tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), karena adanya pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan ini belum ada penyelesaian tentang tunggakan sewa tersebut diatas.

Ternak Guliran dan Tanaman**Rp2.015.034.366,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan Tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan**Rp4.256.299.522,47****Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2018. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
Peralatan dan Mesin	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah Swasta
	50.000.000,00	-	50.000.000,00	Rusak berat Sekolah Swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	-	Aset SMA/SMK belum validasi
Gedung dan Bangunan	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah Swasta
	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat Sekolah Swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum validasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	-	Sekolah Swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST
Dinas PUPR				
Jalan Irigasi dan Jaringan	4.215.321.000,00	2.300.164.916,67	1.915.156.083,33	Akan diserahkan ke Desa
	24.216.792.751,99	24.057.184.639,49	159.608.112,50	Akan diserahkan ke Provinsi
Jumlah	33.078.830.390,99	28.822.530.868,52	4.256.299.522,47	

Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat**Rp5.524.651.737,83**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2018. Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per OPD dapat dilihat pada *lampiran 16*.

Aset Tetap akan dihapuskan selain Rusak Berat**Rp695.234.666,67**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2018. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut:

SKPD	Tanah	Jalan Irigasi dan Jaringan	KDP	Akm Penyusutan	Nilai Buku
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	99.725.000,00				99.725.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		489.507.000,00		117.333.333,33	372.173.666,67
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			223.336.000,00		223.336.000,00
Jumlah	99.725.000,00	489.507.000,00	223.336.000,00	117.333.333,33	695.234.666,67

Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut**Rp241.644.200,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tanah yang masih perlu penelusuran serta Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2018. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut :

SKPD	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tanah	60.905.000,00	0,00	60.905.000,00	Aset Milik Provnsi (butuh penelusuran)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung Bangunan	207.845.000,00	27.105.800,00	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi
Jumlah				241.644.200,00	

6.1.2**Kewajiban****Tahun 2018**
Rp17.355.920.601,30**Tahun 2017**
Rp22.769.968.859,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

		Tahun 2018		Tahun 2017
- Kewajiban Jangka Pendek	Rp	17.290.484.142,29	Rp	22.573.659.482,99
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp	65.436.459,01	Rp	196.309.376,65
Jumlah Kewajiban	Rp	17.355.920.601,30	Rp	22.769.968.859,64

6.1.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>Tahun 2018</u> Rp17.290.484.142,29	<u>Tahun 2017</u> Rp22.573.659.482,99
----------------	--------------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp 0,00	Rp 0,00
- Utang Bunga	Rp 0,00	Rp 0,00
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp 130.872.917,64	Rp 130.872.917,64
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 302.642.824,32	Rp 64.760.833,33
- Utang Belanja	Rp 16.856.968.400,33	Rp 22.378.025.732,02
- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 17.290.484.142,29	Rp 22.573.659.482,99

6.1.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
------------------	---------------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.2.1.2	Utang Bunga	<u>Tahun 2018</u> Rp0,00	<u>Tahun 2017</u> Rp0,00
------------------	--------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018.

6.1.2.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	<u>Tahun 2018</u> Rp130.872.917,64	<u>Tahun 2017</u> Rp130.872.917,64
------------------	--	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri atas Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018. Utang tersebut yang jatuh tempo dan harus dilunasi pada Tahun 2018 yaitu tanggal (5 April dan 5 Oktober 2019) sesuai Perjanjian Penerimaan Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000 tanggal 5 April 2000.

6.1.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>Tahun 2018</u> Rp302.642.824,32	<u>Tahun 2017</u> Rp64.760.833,33
------------------	-----------------------------------	---	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
- Pendapatan yang mempunyai masa manfaat s.d. 2018	Rp 695.991.755,00	Rp 177.625.000,00
- Pendapatan yang telah diakui sebelum Tahun 2018	Rp (95.989.166,67)	Rp (60.777.291,67)

- Diakui sebagai pendapatan Tahun 2018	Rp	(297.359.764,01)	Rp	(52.086.875,00)
Sisa yang masih belum diakui sebagai pendapatan	Rp	302.642.824,32	Rp	64.760.833,33

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 17*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.2.1.5 Utang Belanja	Rp16.856.968.400,33	Rp22.378.025.732,02

Jumlah ini merupakan saldo Utang Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2018. Utang Belanja tersebut diatas akan direalisasikan pembayarannya dalam kegiatan masing-masing OPD Tahun Anggaran 2019. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada *lampiran 18*.

Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2019, masih menguasai uang jaminan reklamasi yang diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.053.554.150,00. Uang tersebut ditempatkan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada *lampiran 19*.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Rp65.436.459,01	Rp196.309.376,65

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang merupakan utang dalam negeri dari pemerintah pusat yang telah diterima.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.2.2.1 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp65.436.459,01	Rp196.309.376,65

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 sebesar Rp65.436.459,01 yang berasal dari Perjanjian Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 dari pinjaman kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman untuk membiayai pembangunan Terminal Karang Sokong, dengan uraian sebagai berikut:

- Plafond Pinjaman : Rp2.260.000.000,00
- Jumlah Penarikan : Rp2.224.839.000,00
- Jangka Waktu pinjaman : 20 tahun – masa tenggang 3 tahun
- Bunga : 11,75% per tahun
- Biaya Komitmen : 0,75% per tahun dihitung 30 hari sejak perjanjian ditanda tangani (5 April 2000)
- Jatuh Tempo Angsuran : 5 April dan 5 Oktober (5-10-2003 s.d. 5-04-2020)
- Pokok Angsuran : Rp65.436.458,82 (selama 34 kali angsuran)
- Denda : 2% / tahun, setiap terjadi kelambatan pembayaran
- *Closing date* : 31 Desember 2020

Dari pokok pinjaman tersebut, sampai dengan 31 Desember 2017 telah dilaksanakan pelunasan sebesar Rp2.028.530.223,42 sehingga saldo pokok utang yang masih harus dibayar sebesar Rp65.436.459,01 setelah dipindahkan ke Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp130.872.917,64 untuk rencana pembayaran di Tahun 2019.

	<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
6.1.3 Ekuitas	Rp1.465.899.602.662,29	Rp1.520.292.462.016,06

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018. Rincian perhitungan nilai ekuitas dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (6.2.4).

6.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6.2.1 Ekuitas Awal **Rp1.520.292.462.016,06**

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2018 sebesar Rp1.520.292.462.016,06 yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2017 setelah audit BPK RI.

6.2.2 Surplus/(Defisit) – LO **Rp67.930.405.182,68**

Jumlah tersebut merupakan surplus Laporan Operasional Tahun 2018. Surplus laporan operasional terjadi disebabkan transaksi-transaksi yang terjadi pada Tahun 2018 baik yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas.

6.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar **Rp(122.323.264.536,45)**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2018 yang terdiri dari:

6.2.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan **Rp12.458.920.320,74**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual terhadap akun-akun yang terdapat di Neraca, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi peralatan dan mesin <i>extracomptable</i>	Rp	00
Koreksi gedung dan bangunan <i>extracomptable</i>	Rp	00
Koreksi akumulasi penyusutan <i>extracomptable</i>	Rp	00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan	Rp	4.006.436.331,74
Penyesuaian Penyisihan Investasi	Rp	8.452.483.989,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	12.458.920.320,74

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan perubahan kedua atas kebijakan akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk penyempurnaan pada kebijakan akuntansi beberapa akun. Hal tersebut mempunyai dampak kebijakan terhadap ekuitas yang telah disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan Tahun 2017, perubahan kebijakan tersebut yaitu:

- 1) Penerapan kebijakan kapitasasi aset tetap kategori peralatan dan mesin untuk nilai dibawah Rp500.000,00 termasuk mebeuleir yang sebelumnya masih tercatat dalam daftar aset tetap OPD.
- 2) Penerapan kebijakan penghitungan metode penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan sebelumnya dilakukan secara tahunan.
- 3) Penerapan kebijakan penilaian investasi non permanen dalam proyek pembangunan untuk pelestarian suatu peninggalan sejarah/cagar budaya menggunakan metode biaya dengan memperhitungkan bagi hasil keuntungan yang disetor kepada Pemerintah Daerah mengurangi nilai investasi.

6.2.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Rp(134.782.184.857,19)

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS	Rp	1.190.267,43
Koreksi saldo awal piutang PBB-P2	Rp	0,00
Koreksi saldo awal piutang retribusi telekomunikasi	Rp	0,00
Koreksi piutang lainnya	Rp	0,00
Koreksi penyisihan piutang pajak	Rp	4.285.521,38
Koreksi penyisihan piutang retribusi kesehatan	Rp	0,00
Koreksi penyisihan piutang bagi hasil pajak provinsi	Rp	0,00
Koreksi penyisihan piutang lainnya	Rp	0,00
Koreksi saldo awal persediaan	Rp	59.313.500,00
Pengembalian dana bergulir Disperindag	Rp	22.669.979,08
Koreksi Tanah	Rp	0,00
Koreksi peralatan dan mesin	Rp	(7.859.191.351,98)
Reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan	Rp	10.716.493.080,03
Reklasifikasi dan koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	499.905.999,90
Reklasifikasi dan koreksi aset tetap lainnya	Rp	(10.766.179.491,98)
Reklasifikasi dan koreksi konstruksi dalam pengerjaan	Rp	(1.189.366.000,00)
Reklasifikasi dan koreksi akumulasi penyusutan	Rp	(126.703.716.058,53)
Koreksi aset lain-lain	Rp	434.574.490,83
Pembayaran bagian lancar utang jangka panjang	Rp	0,00
Koreksi Utang	Rp	19.455.814,95
Lain-lain PAD yang sah RSUD belum diakui	Rp	0,00
Koreksi Pendapatan Hibah Aset	Rp	0,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang	Rp	(30.108.495,61)
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	8.487.887,31
Koreksi ekuitas lainnya	Rp	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	(134.782.184.857,19)

6.2.4 Ekuitas Akhir Rp1.465.899.602.662,29

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2018 atas kegiatan operasionalnya. Nilai ekuitas akhir ini sama dengan nilai ekuitas yang terdapat di neraca per 31 Desember 2018 (6.1.3).

6.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

6.3.1 Pendapatan Daerah

Rp1.482.950.696.123,48

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	200.362.025.514,55
- Pendapatan Transfer	Rp	1.221.829.894.751,97
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	60.758.775.856,96
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	1.482.950.696.123,48

6.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rp200.362.025.514,55

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	Rp	91.995.240.970,84
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	13.199.321.374,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	10.750.650.743,67
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	84.416.812.426,04
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	200.362.025.514,55

6.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rp91.995.240.970,84

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp24.506.243.458,98 atau 78,96%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Hotel	19.502.493.246,33	25.379.268.508,00	5.876.775.261,67	130,13
2	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	12.812.682.655,09	3.812.682.655,09	142,36
3	Pajak Hiburan	57.234.000,00	95.291.904,00	38.057.904,00	166,50
4	Pajak Reklame	517.213.000,00	680.456.500,00	163.243.500,00	131,56
5	Pajak Penerangan Jalan	12.584.544.183,49	13.399.767.689,00	815.223.505,51	106,48
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55.000.000.000,00	21.597.343.125,00	(33.402.656.875,00)	39,27
7	Pajak Parkir	90.000.000,00	23.166.000,00	(66.834.000,00)	25,74
8	Pajak Air Tanah	950.000.000,00	1.104.660.536,00	154.660.536,00	116,28
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.800.000.000,00	6.893.593.373,00	93.593.373,00	101,38
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	12.000.000.000,00	10.009.010.680,75	(1.990.989.319,25)	83,41
Jumlah		116.501.484.429,82	91.995.240.970,84	(24.506.243.458,98)	78,96

Penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Realisasi Pajak Hotel melebihi target disebabkan karena adanya pelunasan pajak pada tahun sebelumnya, penambahan wajib pajak hotel karena adanya Hotel kelas Melati I, II, dan III yang baru, serta tertibnya wajib pajak melunasi kewajibannya disamping diterapkan metode pembayaran pajak dengan sistem online;
2. Realisasi Pajak Restoran melebihi target yang ditetapkan disebabkan jumlah Wajib Pajak yang meningkat karena adanya Restoran, Rumah Makan, Catring, dan Cafeteria baru serta pembayaran tunggakan pajak pada tahun sebelumnya;

3. Realisasi Pajak Hiburan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat pagelaran massal seperti kegiatan 17 Agustus-an serta adanya Spa baru;
4. Realisasi Pajak Reklame melebihi target yang ditetapkan disebabkan banyaknya penggunaan reklame/iklan-iklan oleh Wajib Pajak dan bertambahnya wajib pajak baru;
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya konsumsi listrik untuk industri dan masyarakat pada Wajib Pajak PLN disamping adanya penambahan untuk konsumen baru;
6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibawah target yang ditetapkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tidak bisa memungut pajak dari pengusaha yang tidak memiliki izin usaha pertambangan atau izinya sudah tidak berlaku;
7. Realisasi Pajak Parkir dibawah target yang ditetapkan disebabkan salah satu wajib pajak yaitu Hardy's tidak beroperasi dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar di sektor objek pajak parkir;
8. Realisasi Pajak Air Tanah melampaui target karena adanya pelunasan pajak pada tahun sebelumnya dan peningkatan Wajib Pajak air tanah yang baru;
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan sudah dikelola langsung oleh BPKAD dan sudah menggunakan aplikasi sehingga data pajak bumi dan bangunan yang diperoleh lebih akurat; dan
10. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan dibawah target yang ditetapkan disebabkan bencana alam erupsi Gunung Agung sehingga minat investor yang akan berinvestasi tanah atau bangunan menjadi berkurang.

6.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Rp13.199.321.374,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp5.163.448.626,00 atau 71,88%, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
I.	Retribusi Jasa Umum	7.385.615.000,00	7.509.215.874,00	123.600.874,00	101,67
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	2.800.000.000,00	2.516.214.334,00	(283.785.666,00)	89,86
2	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	340.000.000,00	407.038.000,00	67.038.000,00	119,72
3	Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum	158.000.000,00	194.152.000,00	36.152.000,00	122,88
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	702.272.000,00	531.194.000,00	(171.078.000,00)	75,64
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	1.552.535.000,00	1.595.713.000,00	43.178.000,00	102,78
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	952.808.000,00	1.110.085.000,00	157.277.000,00	116,51
7	Retribusi Pengendalian Menara & Telekomunikasi	550.000.000,00	698.062.540,00	148.062.540,00	126,92
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	410.692.000,00	110.692.000,00	136,90
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	46.065.000,00	16.065.000,00	153,55

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
II.	Retribusi Jasa Usaha	8.721.155.000,00	2.989.527.000,00	(5.731.628.000,00)	34,28
1	<i>Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan</i>	220.530.000,00	196.324.000,00	(24.206.000,00)	89,02
	a. Sewa tanah dan bangunan Dinas Pariwisata	8.729.000,00	6.550.000,00	(2.179.000,00)	75,04
	b. Sewa Tanah Disperindag	111.201.000,00	98.174.000,00	(13.027.000,00)	88,29
	c. Sewa Kantin dan Sewa Tempat ATM	100.600.000,00	89.200.000,00	(11.400.000,00)	88,67
	d. Sewa tanah dan bangunan Dinas Perhubungan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang	2.850.000,00	1.900.000,00	(950.000,00)	66,67
3	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor/ Alat Berat	50.000.000,00	73.575.000,00	23.575.000,00	147,15
4	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	155.625.000,00	116.968.000,00	(38.657.000,00)	75,16
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	245.000.000,00	258.665.000,00	13.665.000,00	105,58
6	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.000.000,00	34.775.000,00	2.775.000,00	108,67
8	<i>Retribusi Tempat Rekreasi olah raga</i>	<i>8.003.150.000,00</i>	<i>2.295.320.000,00</i>	<i>(5.707.830.000,00)</i>	<i>28,68</i>
	a. Ret. Tempat Rekreasi Olahraga Dinas Pariwisata	8.000.000.000,00	2.295.320.000,00	(5.704.680.000,00)	28,69
	b. Ret. Tempat Olahraga Disdikpora	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu	2.256.000.000,00	2.700.578.500,00	444.578.500,00	119,71
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.887.589.000,00	387.589.000,00	125,84
2	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	81.500.000,00	31.500.000,00	163,00
3	Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4	Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi	6.000.000,00	5.478.000,00	(522.000,00)	91,30
5	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	500.000.000,00	726.011.500,00	226.011.500,00	145,20
	Jumlah	18.362.770.000,00	13.199.321.374,00	(5.163.448.626,00)	71,88

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp13.199.321.374,00 atau 71,88% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2018 sebesar Rp7.509.215.874,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp7.385.615.000,00 menunjukkan realisasi di atas anggaran sebesar Rp123.600.874,00 atau 101,67% yang utamanya disebabkan:

- a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan oleh jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
 - b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji;
 - c. Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena masyarakat banyak menggunakan jasa penyedotan kakus; dan
 - d. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.
2. Retribusi Jasa Usaha
- Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2018 sebesar Rp2.989.527.000,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.721.155.000,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp5.731.628.000,00 atau 34,28% yang utamanya disebabkan:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan retribusi sewa tanah dan bangunan lebih rendah dari yang ditetapkan karena dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat atas jasa tersebut;
 - b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan; dan
 - c. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan beberapa ODTW pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat.
3. Retribusi Perijinan Tertentu
- Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.700.578.500,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.256.000.000,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp444.578.500,00 atau 119,71% yang utama disebabkan:
- a. Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melebihi anggaran yang ditetapkan disebabkan meningkatnya jumlah ijin untuk mendirikan bangunan dari masyarakat;
 - b. Penerimaan Retribusi Ijin Gangguan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
 - c. Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
 - d. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan; dan
 - e. Retribusi perijinan mempekerjakan tenaga kerja asing lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp10.750.650.743,67

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi pendapatan dari TA 2018 sebesar Rp10.750.650.743,67 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp990.870.922,51 atau 91,56% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Perusahaan Daerah Air Minum	825.000.000,00	700.985.037,37	(124.014.962,63)	84,97

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
	Kabupaten Karangasem				
2	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	10.916.020.925,18	10.045.206.116,30	(870.814.808,88)	92,02
3	PT Jamkrida Bali Mandara	500.741,00	4.459.590,00	3.958.849,00	890,60
Jumlah		11.741.521.666,18	10.750.650.743,67	(990.870.922,51)	91,56

6.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp84.416.812.426,04

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama TA 2018 adalah sebesar Rp84.416.812.426,04 dibandingkan anggarannya sebesar Rp87.394.223.904,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.977.411.477,96 atau 96,59% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	54.600.000,00	29.600.000,00	218,40
2	Jasa Giro	3.700.000.000,00	4.784.896.116,21	1.084.896.116,21	129,32
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	21.200.288,95	21.200.288,95	0,00
4	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	10.000.000,00	10.555.360,00	555.360,00	105,55
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	159.590.295,48	159.590.295,48	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.160.047.531,84	1.160.047.531,84	0,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.188.114,00	2.188.114,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.317.992.758,06	1.317.992.758,06	0,00
9	Pendapatan dari BLUD	58.000.000.000,00	56.132.734.460,50	(1.867.265.539,50)	96,78
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00
11	Hasil Pengelolaan Kerjasama Pemerintah Daerah	1.557.876.000,00	1.428.006.001,00	(129.869.999,00)	91,66
12	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	24.101.347.904,00	19.333.151.500,00	(4.768.196.404,00)	80,22
Jumlah		87.394.223.904,00	84.416.812.426,04	-2.977.411.477,96	96,59

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Pendapatan BLUD lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan disebabkan tergantung jumlah pasien yang berobat;
2. Hasil pengelolaan kerjasama Pemerintah Daerah lebih kecil dari yang dianggarkan tergantung dari jumlah kunjungan wisatawan yang mempengaruhi bagi hasil keuntungan ke daerah ;dan
3. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan.

6.3.1.2 Pendapatan Transfer Rp1.221.829.894.751,97

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	937.885.910.117,00
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp	99.489.619.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	125.012.273.304,37
- Bantuan Keuangan	Rp	59.442.092.330,60
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	1.221.829.894.751,97

6.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp937.885.910.117,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	19.658.751.772,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	1.301.005.591,00
- Dana Alokasi Umum	Rp	729.378.991.000,00
- Dana Alokasi Khusus	Rp	187.547.161.754,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp	937.885.910.117,00

6.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp19.658.751.772,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat selama TA 2018 adalah sebesar Rp19.658.751.772,00 dibanding anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.570.550.000,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp2.911.798.228,00 atau 87,10% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	2.143.021.000,00	1.588.423.317,00	(554.597.683,00)	74,12
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps.21)	17.266.303.000,00	14.688.068.265,00	(2.578.234.735,00)	85,07
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan	68.499.000,00	88.264.794,00	19.765.794,00	128,86
4	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	3.330.000,00	3.583.839,00	253.839,00	107,62
5	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan	91.442.000,00	55.153.587,00	(36.288.413,00)	60,32
6	Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kab/Kota	2.997.955.000,00	3.235.257.970,00	237.302.970,00	107,92
Jumlah		22.570.550.000,00	19.658.751.772,00	(2.911.798.228,00)	87,10

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang lebih rendah dari anggaran disebabkan oleh:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan karena menurunnya bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan; dan

2. Penerimaan Pajak Penghasilan pribadi (termasuk PPh Pasal 21) menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp1.301.005.591,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak untuk TA 2018 adalah sebesar Rp1.301.005.591,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.424.283.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dibawah anggaran sebesar Rp123.277.409,00 atau 91,34% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Sumber Daya Alam (Perikanan)	943.027.000,00	701.234.591,00	(241.792.409,00)	74,36
2	Bea Cukai Hasil Tembakau	481.256.000,00	599.771.000,00	118.515.000,00	124,63
Jumlah		1.424.283.000,00	1.301.005.591,00	(123.277.409,00)	91,34

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.301.005.591,00 atau 91,34% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam (Perikanan) menunjukkan realisasi sebesar Rp701.234.591,00 atau 74,36% dibandingkan anggarannya disebabkan karena sangat tergantung pada besarnya pendapatan Sumber Daya Alam yang diterima oleh Pemerintah Pusat; dan
2. Penerimaan Bagi Hasil Bea Cukai Tembakau menunjukkan realisasi diatas anggaran yang ditetapkan.

6.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp729.378.991.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2018 adalah sebesar Rp729.378.991.000,00 dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp729.378.991.000,00 menunjukkan realisasi sesuai anggaran yang ditetapkan atau 100%.

6.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Rp187.547.161.754,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp187.547.161.754,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp199.914.958.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus dibawah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.367.796.246,00 atau 93,81%.

6.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp99.489.619.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

6.3.1.2.2.1 Dana Penyesuaian Rp99.489.619.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian untuk TA 2018 adalah sebesar Rp99.489.619.000,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp99.489.619.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian sesuai anggaran yang telah ditetapkan atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Dana Insentif Daerah	35.250.000.000,00	35.250.000.000,00	0,00	100,00
2	Dana Desa	64.239.619.000,00	64.239.619.000,00	0,00	100,00
Jumlah		99.489.619.000,00	99.489.619.000,00	0,00	100,00

6.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi Rp125.012.273.304,37

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp	125.012.273.304,37
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	125.012.273.304,37

6.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp125.012.273.304,37

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.614.239.787,64	43.043.542.682,61	4.429.302.894,97	111,47
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35.125.622.123,37	34.719.920.382,84	(405.701.740,53)	98,84
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.086.561.666,67	29.448.734.848,75	3.362.173.182,08	112,89
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	146.822.666,67	184.170.824,60	37.348.157,93	125,44
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	14.881.382.545,17	17.615.904.565,57	2.734.522.020,40	118,38
Jumlah		114.854.628.789,52	125.012.273.304,37	10.157.644.514,85	108,84

6.3.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pendapatan bagi hasil lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018.

6.3.1.2.4 Bantuan Keuangan Rp59.442.092.330,60

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali	27.769.897.308,20	26.475.192.330,60	(1.294.704.977,60)	95,34
2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	75.466.900.000,00	32.966.900.000,00	(42.500.000.000,00)	43,68
Jumlah		103.236.797.308,20	59.442.092.330,60	(43.794.704.977,60)	57,58

6.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp60.758.775.856,96

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	57.763.756.774,00
- Pendapatan Lainnya	Rp	<u>2.995.019.082,96</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	60.758.775.856,96

6.3.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp57.763.756.774,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Hibah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi penerimaan Pendapatan Hibah untuk TA 2018 sebesar Rp57.763.756.774,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp56.872.100.000,00 menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah melebihi anggaran sebesar Rp891.656.774,00 atau 101,57%.

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp57.763.756.774,00 atau 101,57% dari anggarannya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah BOS.

6.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp2.995.019.082,96

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 yang berasal dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.245.630.974,93 dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp1.749.388.108,03 yang ditujukan untuk Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Agung sebesar Rp1.749.334.103,03 serta lebih transfer Rp54.005,00. Pendapatan untuk penanggulangan bencana terdiri dari penerimaan pada rekening giro BPD Bali Nomor 022.02.02.44480-8 atas nama Peduli Gunung Agung Karangasem sebesar Rp1.697.081.535,85 dan pada rekening tabungan BPD Bali Nomor 022.02.02.44463-9 atas nama Bendahara Penanggulangan Bencana sebesar Rp52.252.567,18

6.3.2 Belanja Daerah Rp1.480.600.620.458,56

Jumlah tersebut realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	1.155.238.912.468,07
- Belanja Modal	Rp	144.906.762.956,72
- Belanja Tak terduga	Rp	2.562.215.485,00
- Belanja Transfer	Rp	<u>177.892.729.548,77</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp	1.480.600.620.458,56

6.3.2.1 Belanja Operasi**Rp1.155.238.912.468,07**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai	Rp	735.880.551.079,62
- Belanja Barang	Rp	411.039.360.832,28
- Belanja Bunga	Rp	22.984.556,17
- Belanja Subsidi	Rp	0,00
- Belanja Hibah	Rp	6.151.450.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.144.566.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.155.238.912.468,07

6.3.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp735.880.551.079,62**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	447.077.511.454,68	443.367.489.689,00	(3.710.021.765,68)	99,17
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	245.559.741.269,00	241.810.068.300,00	(3.749.672.969,00)	98,47
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.270.000.000,00	6.270.000.000,00	0,00	100,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.470.244.755,71	3.959.273.501,67	(510.971.254,04)	88,57
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	599.482.092,00	270.489.317,45	(328.992.774,55)	45,12
6	Insentif Jasa Pelayanan	16.785.876.137,60	15.161.697.721,50	(1.624.178.416,10)	90,32
7	Belanja Honorarium PNS	16.954.289.830,00	13.614.136.250,00	(3.340.153.580,00)	80,30
8	Belanja Honorarium Non PNS	7.713.306.100,00	6.487.180.500,00	(1.226.125.600,00)	84,10
9	Belanja Uang Lembur	1.089.631.040,87	970.672.000,00	(118.959.040,87)	89,08
10	Belanja Honorarium Non Pegawai	89.600.000,00	31.200.000,00	(58.400.000,00)	34,82
11	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Honorarium Dewan Pengawas BLUD	94.018.800,00	94.018.800,00	0,00	100,00
13	Belanja Uang Transport	5.558.525.000,00	3.844.325.000,00	(1.714.200.000,00)	69,16
Jumlah		752.262.226.479,86	735.880.551.079,62	(16.381.675.400,24)	97,82

Terjadi jenis belanja yang melampaui anggarannya untuk belanja Pengadaan alat – alat kesehatan/Kesehatan Hewan, Belanja Bahan Obat-obatan Rumah Sakit, Belanja Darah Siap Transfusi serta Insentif Jasa Pelayanan pada BLU RSUD dengan besaran fleksibilitas sebesar Rp3.994.378.693,00 berdasarkan SK Direktur RSUD Kabupaten Karangasem Nomor 170 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

6.3.2.1.2 Belanja Barang

Rp411.039.360.832,28

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
A.	Belanja Persediaan				
1	Belanja Bahan Pakai Habis	37.243.851.117,34	36.144.140.067,50	(1.099.711.049,84)	97,05
2	Belanja Bahan/Material	32.598.584.905,25	31.895.108.750,50	(703.476.154,75)	97,84
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.510.382.646,92	9.899.640.260,00	(610.742.386,92)	94,19
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.337.846.990,08	10.014.528.008,00	(1.323.318.982,08)	88,33
	Jumlah belanja persediaan	91.690.665.659,59	87.953.417.086,00	(3.737.248.573,59)	95,92
B.	Belanja Jasa				
1	Belanja Jasa Kantor	131.915.920.291,88	121.540.298.211,00	(10.375.622.080,88)	92,13
2	Belanja Premi Asuransi	843.575.000,00	748.719.692,00	(94.855.308,00)	88,76
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	714.028.100,00	452.884.200,00	(261.143.900,00)	63,43
4	Belanja Cetak dan Penggandaan - Fotocopy	3.461.123.398,50	3.244.078.231,00	(217.045.167,50)	93,73
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.339.774.447,00	944.929.689,00	(394.844.758,00)	70,53
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	906.162.259,00	813.218.175,00	(92.944.084,00)	89,74
7	Belanja Sewa Alat Berat	35.200.000,00	35.000.000,00	(200.000,00)	99,43
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.821.618.523,00	3.177.778.998,00	(643.839.525,00)	83,15
9	Belanja Makanan dan Minuman	33.503.049.628,00	28.454.163.983,00	(5.048.885.645,00)	84,93
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.042.050.000,00	966.915.500,00	(75.134.500,00)	92,79
11	Belanja Pakaian Kerja	1.185.685.000,00	1.140.616.440,00	(45.068.560,00)	96,20
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.416.186.640,00	2.323.725.275,00	(92.461.365,00)	96,17
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.947.869.096,96	5.619.132.522,00	(328.736.574,96)	94,47
14	Belanja Jasa Konsultansi	5.145.120.400,00	4.305.892.850,00	(839.227.550,00)	83,69
15	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Iuran Peserta PBI Daerah	31.483.932.000,20	31.168.634.000,00	(315.298.000,20)	99,00
17	Belanja Kerjasama	270.000.000,00	269.212.900,00	(787.100,00)	99,71
18	Belanja Beasiswa Pendidikan	20.699.200.000,00	20.650.500.000,00	(48.700.000,00)	99,76
19	Belanja Aset Lainnya	87.000.000,00	29.500.000,00	(57.500.000,00)	33,91
	Jumlah Belanja Jasa	244.817.494.784,54	225.885.200.666,00	(18.932.294.118,54)	92,27
C.	Belanja Pemeliharaan				
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.896.495.833,00	4.589.891.299,00	(306.604.534,00)	93,74
2	Belanja Pemeliharaan	23.321.769.829,34	18.631.784.925,00	(4.689.984.904,34)	79,89
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	28.218.265.662,34	23.221.676.224,00	(4.996.589.438,34)	82,29
D.	Belanja Perjalanan Dinas	53.785.944.386,29	47.750.587.410,28	(6.035.356.976,01)	88,78

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
E.	Belanja Hibah Barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	2.798.300.000,00	2.312.300.000,00	(486.000.000,00)	82,63
F.	Belanja Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat	17.383.642.647,97	17.319.421.700,00	(64.220.947,97)	99,63
G.	Belanja Lainnya				
1	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga – Hadiah	849.321.514,00	812.048.800,00	(37.272.714,00)	95,61
2	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga – Serahan Pelatihan	1.489.780.700,00	1.292.843.050,00	(196.937.650,00)	86,78
3	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.519.488.165,00	4.491.865.896,00	(27.622.269,00)	99,39
	Jumlah Belanja Lain-Lain	6.858.590.379,00	6.596.757.746,00	(261.832.633,00)	96,18
	Jumlah	445.552.903.519,73	411.039.360.832,28	(34.513.542.687,45)	92,25

6.3.2.1.3 **Belanja Bunga** **Rp22.984.556,17**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi pembayaran Bunga Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp22.984.556,17 dibandingkan anggarannya sebesar Rp100.000.000,00 menunjukkan realisasi Pembayaran Bunga dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.015.443,83 atau 22,98%. Belanja bunga tersebut digunakan untuk membayar bunga atas Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Penjelasan Neraca poin 6.1.2.2.1.

6.3.2.1.4 **Belanja Subsidi** **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Subsidi Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018.

6.3.2.1.5 **Belanja Hibah** **Rp6.151.450.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp6.151.450.000,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp7.143.000.000,00 menunjukkan realisasi Hibah dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp991.550.000,00 atau 86,12%.

6.3.2.1.6 **Belanja Bantuan Sosial** **Rp2.144.566.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 adalah

sebesar Rp2.144.566.000,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp24.650.000.000,00 menunjukkan realisasi Bantuan Sosial dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.505.434.000,00 atau 8,70%.

6.3.2.2 Belanja Modal Rp144.906.762.956,72

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Tanah	816.700.924,00	0,00	(816.700.924,00)	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	40.587.942.012,00	34.207.855.565,05	(6.380.086.446,95)	84,28
3	Belanja Gedung & Bangunan	29.535.856.520,00	26.449.987.947,02	(3.085.868.572,98)	89,55
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	94.093.230.100,00	68.651.037.477,65	(25.442.192.622,35)	72,96
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.176.110.677,35	15.597.881.967,00	(1.578.228.710,35)	90,81
6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		182.209.840.233,35	144.906.762.956,72	(37.303.077.276,63)	79,53

Rincian belanja modal untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada *lampiran 18*.

6.3.2.3 Belanja Tak Terduga Rp2.562.215.485,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2018 sebesar Rp2.562.215.485,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp3.401.836.556,90 menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2018 dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp839.621.071,90 atau 75,32%.

6.3.2.4 Transfer Rp177.892.729.548,77

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 yang merupakan transfer/bagi hasil pendapatan dan belanja bantuan keuangan.

6.3.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp13.260.786.666,77

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	15.145.192.975,88	11.661.225.478,01	(3.483.967.497,87)	77,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.387.160.100,00	1.599.561.188,76	(787.598.911,24)	67,01
Jumlah		17.532.353.075,88	13.260.786.666,77	(4.271.566.409,11)	75,64

6.3.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp164.631.942.882,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	139.577.001.400,00	139.577.001.400,00	0,00	100,00
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	811.765.832,00	797.941.482,00	(13.824.350,00)	98,30
3	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian	14.719.400.000,00	14.687.400.000,00	(32.000.000,00)	99,78
4	Transfer Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman Kecamatan Karangasem	301.600.000,00	297.600.000,00	(4.000.000,00)	98,67
5	Transfer Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat Kecamatan Karangasem	1.235.000.000,00	1.222.000.000,00	(13.000.000,00)	98,95
6	Transfer Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kecamatan Karangasem	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
7	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	8.350.000.000,00	7.900.000.000,00	(450.000.000,00)	94,61
Jumlah		165.144.767.232,00	164.631.942.882,00	(512.824.350,00)	99,69

6.3.3 **Pembiayaan** **Rp118.476.077.467,58**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit yang timbul dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.3.3.1 **Penerimaan Pembiayaan** **Rp122.206.950.385,22**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk TA 2018 sebesar Rp122.206.950.385,22 dibandingkan anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp82.206.950.385,22 atau 305,52%. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp122.184.280.406,14 dan Penerimaan Piutang Daerah dari Dana Bergulir sebesar Rp22.669.979,08. Penerimaan pembiayaan tersebut untuk menutup kebutuhan belanja tahun berjalan.

6.3.3.2 **Pengeluaran Pembiayaan** **Rp3.730.872.917,64**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.730.872.917,64 dibandingkan anggarannya sebesar Rp3.745.000.000,00 menunjukkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan Rp14.127.082,36 atau 99,62% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal sejumlah Rp3.600.000.000,00 dilakukan untuk penambahan modal di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem sebesar Rp1.000.000.000,00, PDAM Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.100.000.000,00, dan PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp500.000.000,00 dalam bentuk kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp130.872.917,64 merupakan pembayaran atas pinjaman pemerintah pusat No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 untuk membiayai Terminal Karang Sokong.

6.3.4 Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 120.826.153.132,50

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2018 memiliki nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp120.825.374.236,36 yaitu penjumlahan antara nilai Surplus/(Defisit) Anggaran sebesar Rp2.349.296.768,78 dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp118.476.077.467,58 SILPA tersebut terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	104.396.111.251,41
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	92.065.976,86
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	100.735.375,50
- Kas di Bendahara JKN	Rp	11.958.056.410,83
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.187.155.341,03
- Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	3.092.028.776,87
Jumlah SILPA	Rp	<u>120.826.153.132,50</u>

Hal ini telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian neraca poin 6.1.1.1.5.

6.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

6.4.1 Kegiatan Operasional

Jumlah tersebut merupakan Surplus yang diperoleh dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018, dengan perhitungannya sebagai berikut:

- Pendapatan– LO	Rp	1.516.305.870.171,78
- Beban	Rp	1.445.692.386.779,10
Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	70.613.483.392,68

6.4.1.1 Pendapatan– LO **Rp1.516.305.870.171,78**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah– LO	Rp	220.453.290.367,87
- Pendapatan Transfer– LO	Rp	1.224.164.783.594,95
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	Rp	71.687.796.208,96
Jumlah Pendapatan– LO	Rp	1.516.305.870.171,78

6.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO **Rp220.453.290.367,87**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp	95.822.297.563,18
- Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp	13.210.781.775,67
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Rp	22.338.638.040,10
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp	89.081.572.988,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	220.453.290.367,87

6.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah– LO **Rp95.822.297.563,18**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Operasional (LO) ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2018 sebesar Rp3.827.056.592,34. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assesment</i> Tahun 2018 berdasarkan inventarisasi piutang	21.305.890.113,07
2.	Pengakuan pendapatan LO atas ketetapan pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>official assesment</i> Tahun 2018 yang belum dibayar	3.466.434.516,00
Jumlah		24.772.324.629,07

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assessment</i> Tahun 2017 (hotel, restoran, hiburan dan MBLB) pada BPKAD	20.674.841.879,07
2.	Pengakuan atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame pada BPKAD atas perjanjian tahun 2018	270.426.157,66
Jumlah		20.945.268.036,73

6.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah– LO Rp13.210.781.775,67

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO ini lebih besar dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2018 sebesar Rp11.460.401,67. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata untuk perjanjian sebelum tahun 2018	22.327.500,00
2.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang retribusi menara telekomunikasi yang belum bayar pada Diskominfo Tahun 2018	236.333.906,00
Jumlah		258.661.406,00

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas pelunasan piutang Jasa Usaha Sewa Tanah tahun 2016 yang dilaporkan dan dibayar tahun 2018 pada Dinas Perhubungan	2.400.000,00
2.	Pengakuan atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan sewa pada Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pariwisata atas perjanjian tahun 2018	13.783.333,33
4.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas piutang retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017	231.017.671,00
Jumlah		247.201.004,33

6.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO Rp22.338.638.040,10

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pendapatan tersebut merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Karangasem kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PDAM Kabupaten Karangasem dan PT Jamkrida Bali Mandara. Selain itu termasuk pengakuan kenaikan dan penurunan ekuitas pada PDAM karena kepemilikan sebesar 100% dengan *equity method*. Kenaikan ekuitas PDAM yang diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah - LO sebesar Rp1.358.331.427,90.

6.4.1.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Rp89.081.572.988,92

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO ini lebih besar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2018 sebesar Rp4.670.096.562,88. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi penambahan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang denda pajak pada BPKAD Tahun 2018.	1.175.893.435,72
2.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang BLUD pada RSUD Tahun 2018.	14.986.366.613,00
3.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan yang sudah diterima sebelum Tahun 2018 dengan masa perjanjian sampai Tahun 2018 pada RSUD,	24.000.000,00
4.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah - LO atas piutang denda retribusi telekomunikasi pada Inkom Tahun 2018.	1.163.636,00
Jumlah		16.187.423.684,72

- Pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang BLU Tahun 2017 yang disetor Tahun 2018.	Rp9.445.409.877,00
3.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan bagi hasil Taman Ujung Tahun 2018.	Rp910.489.536,00
4.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah –LO atas pelunasan piutang lainnya atas denda pajak pada BPKAD Tahun 2018	Rp1.160.047.531,84
5.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah – LO atas pelunasan piutang lainnya atas denda retribusi pada Inkom Tahun 2018	1.380.177,00
Jumlah		Rp11.517.327.121,84

6.4.1.2 Pendapatan Transfer– LO Rp1.224.164.783.594,95

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer - LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	Rp	937.885.910.117,00
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	Rp	99.489.619.000,00
- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Rp	127.347.162.147,35
- Bantuan Keuangan– LO	Rp	59.442.092.330,60
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	Rp	1.224.164.783.594,95

6.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Rp937.885.910.117,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak– LO	Rp	19.658.751.772,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	Rp	1.301.005.591,00
- Dana Alokasi Umum – LO	Rp	729.378.991.000,00
- Dana Alokasi Khusus Fisik– LO	Rp	44.564.408.297,00
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	Rp	142.982.753.457,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan– LO	Rp	937.885.910.117,00

6.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak– LO Rp19.658.751.772,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO Rp1.301.005.591,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum– LO Rp729.378.991.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Umum – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Umum dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik- LO Rp44.564.408.297,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik– LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik- LO Rp142.982.753.457,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO **Rp99.489.619.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian untuk dana desa.

6.4.1.2.2.1 Dana Penyesuaian– LO **Rp99.489.619.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Penyesuaian dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi– LO **Rp127.347.162.147,35**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO	Rp	127.347.162.147,35
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	Rp	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Rp	127.347.162.147,35

6.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO **Rp127.347.162.147,35**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LO ini lebih besardariPendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LRATA 2018 sebesar Rp2.334.888.842,98. Hal yang mempengaruhi perbedaan pengakuan pendapatan tersebut seperti pada uraian dibawah ini:

- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah DaerahLainnya yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA yaituPengakuan pendapatan LO atas piutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali Tahun 2018 sebesar Rp11.296.921.584,45.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah DaerahLainnya yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA adalahpiutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali tahun 2017 yang ditransfer Tahun 2018 sebesar Rp8.962.032.741,47.

6.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2.4 Bantuan Keuangan– LO **Rp59.442.092.330,60**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Bantuan Keuangan – LO dari Pemerintah Provinsi serta dari Kabupaten Lainnya untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang terdiri dari:

- Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi – LO	Rp	26.475.192.330,60
- Pendapatan Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO	Rp	32.966.900.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan – LO	Rp	59.442.092.330,60

6.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Rp71.687.796.208,96

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	68.692.777.126,00
- Pendapatan Lainnya	Rp	2.995.019.082,96
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp	71.687.796.208,96

6.4.1.3.1 Pendapatan Hibah– LO Rp68.692.777.126,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah– LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO ini lebih tinggi dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2018 sebesar Rp6.624.676.352,00 dikarenakan adanya pengakuan pendapatan hibah non tunai berupa persediaan dan aset tetap yang menambah nilai Pendapatan Hibah dalam LO ini dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2018 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan hibah alat kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Bali	188.593.875,00
2.	Penerimaan hibah aset beberapa OPD	4.246.859.063,00
3.	Penerimaan hibah bangunan lainnya dari Kemenkes kepada Dinkes	690.384.000,00
4.	Penerimaan hibah persediaan obat <i>buffer stock</i> dari Pemprov Bali	1.498.839.414,00
Jumlah		6.624.676.352,00

6.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya– LO Rp2.995.019.082,96

Jumlah tersebut merupakan pengakuan pendapatan Lainnya – LO oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai dari Pendapatan Lainnya dalam LRA TA 2018.

6.4.1.2 Beban Rp1.445.692.386.779,10

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	818.290.591.484,88
- Beban Persediaan	Rp	94.353.361.525,82
- Beban Jasa	Rp	131.335.124.284,98
- Beban Pemeliharaan	Rp	24.104.032.224,00
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	47.750.587.410,28
- Beban Bunga	Rp	22.984.556,17
- Beban Subsidi	Rp	-
- Beban Hibah	Rp	6.151.450.000,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	19.463.987.700,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	113.268.830.581,53

- Beban Penyisihan Piutang	Rp	3.782.070.488,67
- Beban Transfer	Rp	177.892.729.548,77
- Beban Lain-Lain	Rp	9.276.636.974,00
Jumlah Beban	Rp	<u>1.445.692.386.779,10</u>

6.4.1.2.1 Beban Pegawai Rp818.290.591.484,88

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan beban pegawai dalam LO ini lebih besar dari Belanja Pegawai dalam LRA TA 2018 sebesar Rp82.410.040.405,26. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Belanja Pegawai, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi penambahan Beban Pegawai dari Belanja Pegawai LRA pengakuan beban pegawai atas utang jangka pendek RSUD, beberapa dinas penghasil Tahun 2018, serta beberapa OPD sebesar Rp9.382.364.223,82 + 51.965.309,24.
- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dari Belanja Pegawai LRA adalah pengakuan beban pegawai atas utang jangka pendek RSUD, beberapa dinas penghasil Tahun 2017 serta beberapa OPD yang dibayar pada Tahun 2018 sebesar Rp18.413.089.555,80 + 1.030.192,00.

6.4.1.2.2 Beban Persediaan Rp94.353.361.525,82

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Persediaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Beban Persediaan dalam LO ini lebih besar dari Belanja Persediaan dalam LRA sebesar Rp6.440.134.914,82. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Persediaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi penambahan Beban Persediaan – LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban persediaan- LO atas persediaan pada Tahun 2018.	13.504.617.227,80
2.	Pengakuan beban persediaan – LO atas penerimaan hibah Alkon dari BKKBN pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	188.593.875,00
3.	Pengakuan beban persediaan – LO atas utang jangka pendek pada Tahun 2018	6.260.252.500,00
4.	Pengakuan beban persediaan-LO atas kurang catat karcis pada Dinas Catatan Sipil Tahun 2017	59.313.500,00
Jumlah		20.012.777.102,80

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi pengurangan Beban Persediaan –LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban persediaan- LO atas belanja bahan pakai habis, material dan bahan, cetak, dll Tahun 2018 yang masih menjadi persediaan.	10.519.120.446,98
2.	Pengurangan beban persediaan – LO atas pembayaran utang jangka pendek Tahun 2016.	3.053.521.741,00
Jumlah		13.572.642.187,98

6.4.1.2.3 Beban Jasa**Rp131.335.124.284,98**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Beban Jasa dalam LO ini lebih kecil dari Belanja Jasa dalam LRA sebesar Rp3.161.180.188,02. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi penambahan Beban Jasa –LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban jasa- LO atas belanja sewa dengan perjanjian lebih dari satu tahun yang Tahun 2018 masih menjadi beban atas perjanjian sebelum tahun 2017.	13.325.000,00
2.	Pengakuan beban jasa – LO atas utang jangka pendek pada beberapa OPD Tahun 2018.	314.959.497,00
Jumlah		328.284.497,00

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi pengurangan Beban Jasa–LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban jasa- LO atas belanja sewa dan jasa lainnya Tahun 2018 yang masih mempunyai masa manfaat tahun berikutnya	92.910.000,02
2.	Pengurangan beban jasa – LO atas pembayaran utang jangka pendek Tahun 2017.	262.335.085,00
3.	Pengurangan beban jasa – LO karena kapitalisasi ke aset tetap JIJ pada PUPR	33.718.000,00
4.	Pengurangan beban jasa – LO karena kapitalisasi ke aset tidak berwujud pada PUPR	3.100.501.600,00
Jumlah		3.489.464.685,02

6.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan**Rp24.104.032.224,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO ini lebih besar dari Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2018 sebesar Rp63.775.000,00. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Pemeliharaan yang mempengaruhi penambahan Beban Pemeliharaan–LO dari Belanja Pemeliharaan LRA terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban pemeliharaan – LO atas utang jangka pendek Tahun 2018 pada RSUD.	217.575.000,00
Jumlah		

- Pengakuan Beban Pemeliharaan yang mempengaruhi pengurangan Beban Pemeliharaan–LO dari Belanja Pemeliharaan LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Realisasi belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi aset gedung dan bangunan pada Disnakertran dan DPPPA	153.800.000,00
Jumlah		153.800.000,00

6.4.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	Rp47.750.587.410,28
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO ini sama dengan belanja bunga LRA Tahun 2018.	
6.4.1.2.6	Beban Bunga	Rp22.984.556,17
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah pengakuan Beban Bunga dalam LO ini sama dengan belanja bunga LRA Tahun 2018. Rincian dapat dilihat pada rincian belanja bunga LRA.	
6.4.1.2.7	Beban Subsidi	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.1.2.8	Beban Hibah	Rp6.151.450.000,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.1.2.9	Beban Bantuan Sosial	Rp19.463.987.700,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Bantuan Sosial pada LRA TA 2018. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada rincian Belanja Bantuan Sosial LRA.	
6.4.1.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp113.268.830.581,53
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.1.2.11	Beban Penyisihan Piutang	Rp3.782.070.488,67
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.1.2.12	Beban Transfer	Rp177.892.729.548,77
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 yang terdiri dari:	
	- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 11.661.225.478,01
	- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 1.599.561.188,76
	- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 164.631.942.882,00
	Jumlah Beban Transfer	Rp <u>177.892.729.548,77</u>

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah **Rp11.661.225.478,01**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pajak LRA Tahun 2018.

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya **Rp1.599.561.188,76**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pendapatan lainnya LRA Tahun 2018.

**Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** **Rp164.631.942.882,00**

Jumlah tersebut merupakan Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa dan partai politik oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer Bantuan Keuangan LRA Tahun 2018.

6.4.1.2.13 Beban Lain-Lain **Rp9.276.636.974,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-Lain oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Pengakuan Beban Lain-Lain tersebut berasal dari pengakuan beban atas belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Belanja Hadiah/Penghargaan dan serahan pelatihan	2.104.891.850,00
2.	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Uang untuk Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	4.491.865.896,00
Jumlah		6.596.757.746,00

6.4.1.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional **Rp70.613.483.392,68**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 merupakan selisih dari Pendapatan – LO sebesar Rp1.516.305.870.171,78 dan beban sebesar Rp1.445.692.386.779,10.

6.4.2 Kegiatan Non Operasional **Rp(120.862.725,00)**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018 dengan perincian sebagai berikut:

- Surplus Non Operasional	Rp	0,00
- Defisit Non Operasional	Rp	(120.862.725,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(120.862.725,00)

6.4.2.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.

6.4.2.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.	
6.4.2.3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.	
6.4.2.4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2017.	
6.4.2.5	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp120.862.725,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.2.6	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp70.492.620.667,68
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.3	Pos Luar Biasa	(Rp2.562.215.485,00)
	Jumlah tersebut merupakan nilai Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terjadi selama TA 2018. Pos Luar Biasa tersebut terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Karangasem.	
6.4.3.1	Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018.	
6.4.3.2	Beban Luar Biasa	Rp2.562.215.485,00
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Tidak Terduga LRA Tahun 2018.	
6.4.4	Surplus/(Defisit) – LO	Rp67.930.405.182,68
	Jumlah tersebut merupakan nilai Surplus atas Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:	
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 70.492.620.667,68
	Pos Luar Biasa	Rp (2.562.215.485,00)
	Surplus Laporan Operasional	Rp <u>67.930.405.182,68</u>

6.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama tahun anggaran 2018. Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2018 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2018.

6.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.1.1 Arus Masuk Kas

Pendapatan Pajak Daerah	Rp91.995.240.970,84
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp13.199.321.374,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp10.750.650.743,67
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp84.362.212.426,04
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp19.658.751.772,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp1.301.005.591,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp729.378.991.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp44.564.408.297,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp142.982.753.457,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	Rp99.489.619.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp125.012.273.304,37
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp0,00
Bantuan Keuangan	Rp0,00
Pendapatan Hibah	Rp57.763.756.774,00
Pendapatan Lainnya	Rp62.437.111.413,56
Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp1.482.896.096.123,48

6.5.1.2 Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai	Rp735.880.551.079,62
Belanja Barang dan Jasa	Rp411.039.360.832,28
Belanja Bunga	Rp22.984.556,17
Belanja Subsidi	Rp0,00
Belanja Hibah	Rp6.151.450.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp2.144.566.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00
Belanja Tak Terduga	Rp2.562.215.485,00

Bagi Hasil Pajak	Rp13.260.786.666,77
Bagi Hasil Retribusi	Rp164.631.942.882,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp1.335.693.857.501,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp147.202.238.621,64

Selama TA 2018, arus kas masuk aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.482.896.096.123,48 dan arus kas keluar sebesar Rp1.335.693.857.501,84, sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp147.202.238.621,64 yang digunakan untuk membiayai aktivitas lainnya.

6.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

6.5.2.1 Arus Masuk Kas

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp54.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp54.600.000,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan tersebut berasal dari penjualan perlengkapan/peralatan kantor tidak dipakai, penjualan sisa bahan bekas bangunan yang asetnya telah dihapuskan dari daftar aset tetap, dan penjualan hasil perikanan.

6.5.2.2 Arus Keluar Kas

Belanja Tanah	Rp0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp34.207.855.565,05
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp26.449.987.947,02
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp68.651.037.477,65
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp15.597.881.967,00
Belanja Aset Lainnya	Rp0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp3.600.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp148.506.762.956,72
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	Rp(148.452.162.956,72)

Selama TA 2018, arus kas masuk bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp54.600.000,00 dan arus kas keluar sebesar Rp148.506.762.956,72 sehingga terdapat kekurangan kas untuk membiayai aktivitas investasi/investasi aset non keuangan sebesar Rp148.452.162.956,72. Kekurangan tersebut dibiayai dari aktivitas lainnya.

6.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.3.1 Arus Masuk Kas

Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Rp22.669.979,08
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp22.669.979,08

6.5.3.2 Arus Keluar Kas

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	Rp130.872.917,64
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp130.872.917,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp(108.202.938,56)

Selama TA 2018, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp22.669.979,08 dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp130.872.917,64 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp108.202.938,56.

6.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2018. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

6.5.4.1 Arus Masuk Kas

Iuran Wajib Pegawai	Rp6.094.427.166,00
Pajak Penghasilan Pasal.21	Rp31.205.487.672,50
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp794.526.229,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp723.652.658,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	Rp2.569.037.443,00
PPN	Rp17.974.553.092,00
Taperum	Rp610.443.000,00
Taspen	Rp24.355.006.742,00
BPJS	Rp9.144.185.213,00

PFK Lainnya	Rp1.490.166.485,00
JKK	Rp668.941.145,00
JKM	Rp2.607.771.692,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp98.238.198.537,50

6.5.4.2 Arus Keluar Kas

Iuran Wajib Pegawai	Rp6.094.427.166,00
Pajak Penghasilan Pasal.21	Rp31.205.487.672,50
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp794.526.229,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp723.652.658,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	Rp2.569.037.443,00
PPN	Rp17.974.553.092,00
Taperum	Rp610.443.000,00
Taspen	Rp24.355.006.742,00
BPJS	Rp9.144.185.213,00
PFK Lainnya	Rp1.490.166.485,00
JKK	Rp668.941.145,00
JKM	Rp2.607.771.692,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp98.238.198.537,50

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran **Rp0,00**

Selama TA 2018, arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp98.238.198.537,50 dan arus kas keluarnya sebesar Rp98.238.198.537,50, sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00.

6.5.5 KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS SELAMA PERIODE INI **Rp(1.358.127.273,64)**

Jumlah penurunan kas selama periode tahun 2018 sebesar Rp(1.358.127.273,64) yang merupakan jumlah keseluruhan arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

6.5.6 SALDO AWAL KAS DI BUD **Rp122.183.090.138,71**

Saldo awal Kas di BUD merupakan saldo akhir kas di BUD tahun 2017 sebesar Rp122.183.090.138,71.

6.5.7 KOREKSI SALDO AWAL KAS DI BUD **Rp1.190.267,43**

Jumlah koreksi saldo awal Kas di BUD terdiri dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.190.267,43.

6.5.8 SALDO AKHIR KAS DI BUD **Rp120.826.153.132,50**

Saldo akhir Kas di BUD sebesar Rp120.826.153.132,50 diperoleh dari penjumlahan penurunan kas periode tahun 2018 sebesar Rp(1.358.127.273,64) dengan saldo awal Kas di

BUD sebesar Rp122.183.090.138,71 dan koreksi saldo awal Kas di BUD sebesar Rp1.190.267,43.

6.5.9 SALDO AKHIR KAS Rp120.826.153.132,50

Jumlah saldo sebesar Rp120.826.153.132,50 merupakan Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2018 yang jumlahnya harus sama dengan SILPA LRA, Saldo Anggaran Lebih LPSAL, dan SILPA Neraca 31 Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah	Rp	104.396.111.251,41
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	92.065.976,86
4) Kas di Bendahara BLUD	Rp	100.735.375,50
5) Kas di Bendahara JKN	Rp	11.958.056.410,83
6) Kas di Bendahara BOS	Rp	1.187.155.341,03
7) Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	0,00
8) Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	3.092.028.776,87
Jumlah	Rp	120.826.153.132,50

6.6 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo SILPA atau SIKPA pada tahun pelaporan yaitu Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

6.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp122.183.090.138,71**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2018 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2017, yang terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	Rp	107.201.056.359,84
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	88.108.990,00
4) Kas di Bendahara BLUD	Rp	2.926.579.789,00
5) Kas di Bendahara JKN	Rp	8.831.301.662,33
6) Kas di Bendahara BOS	Rp	1.793.348.663,70
7) Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	Rp	50.000,00
8) Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	Rp	1.342.644.673,84
Jumlah	Rp	122.183.090.138,71

6.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan **Rp(122.184.280.406,14)**

Jumlah tersebut merupakan SILPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2017 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2018 dan digunakan seluruhnya dalam operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2018 sebesar Rp(122.184.280.406,14).

6.6.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) **Rp120.826.153.132,50**

6.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp(1.190.267,43)**

Koreksi kesalahan pembukuan terdiri dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.190.267,43.

6.6.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp120.826.153.132,50**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2018 yang jumlahnya sama dengan SILPA LRA, Saldo Akhir LAK, dan SILPA Neraca 31 Desember 2018.

6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akruaI atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akruaI. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Laba Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akruaI pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

BAB VII

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Pada tahun 2018 diterapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD dimana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada tahun 2018 Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketenagakerjaan
10. Dinas Pemadam Kebakaran
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20. Dinas Kebudayaan
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Rumah Sakit Umum Daerah
29. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

34. Kecamatan Karangasem
35. Kecamatan Kubu
36. Kecamatan Abang
37. Kecamatan Bebandem
38. Kecamatan Selat
39. Kecamatan Manggis
40. Kecamatan Rendang
41. Kecamatan Sidemen

Dalam Tahun 2018 terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Amlapura, 22 Mei 2019
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	6.5.1		
Arus Masuk Kas	6.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		91.995.240.970,84	96.850.262.306,72
Pendapatan Retribusi Daerah		13.199.321.374,00	12.590.471.840,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.750.650.743,67	11.519.621.044,16
Lain-lain PAD yang Sah		84.362.212.426,04	77.678.980.248,08
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		19.658.751.772,00	22.159.874.297,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.301.005.591,00	1.073.244.507,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum		729.378.991.000,00	722.184.384.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik		44.564.406.297,00	203.716.526.855,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		142.982.753.457,00	
Pendapatan Dana Penyesuaian		99.489.619.000,00	71.182.742.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		125.012.273.304,37	115.364.651.529,10
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Bantuan Keuangan		-	130.625.906.203,62
Pendapatan Hibah		57.763.756.774,00	57.937.837.284,29
Pendapatan Lainnya		62.437.111.413,56	3.027.066.776,84
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.482.896.096.123,48	1.525.911.568.892,07
Arus Keluar Kas	6.5.1.2		
Belanja Pegawai		735.880.551.079,62	712.006.526.726,93
Belanja Barang dan Jasa		411.039.360.832,28	367.534.880.607,25
Belanja Bunga		22.984.556,17	633.649.883,42
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		6.151.450.000,00	11.370.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial		2.144.566.000,00	1.461.164.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		-	-
Belanja Tak Terduga		2.562.215.485,00	826.041.200,00
Bagi Hasil Pajak		13.260.786.666,77	8.233.019.390,77
Bagi Hasil Retribusi		164.631.942.882,00	1.251.923.998,61
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	165.834.010.414,43
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.335.693.857.501,84	1.269.151.796.201,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6.5.1.3	147.202.238.621,64	256.759.772.690,66
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	6.5.2		
Arus Masuk Kas	6.5.2.1		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		54.600.000,00	24.336.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas		54.600.000,00	24.336.800,00
Arus Keluar Kas	6.5.2.2		
Belanja Tanah		-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		34.207.855.565,05	47.643.769.912,00
Belanja Gedung dan Bangunan		26.449.987.947,02	60.248.410.581,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		68.651.037.477,65	111.925.459.217,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.597.881.967,00	17.252.246.653,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		148.506.762.956,72	240.669.886.363,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	6.5.2.3	(148.452.162.956,72)	(240.645.549.563,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	6.5.3		
Arus Masuk Kas	6.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		22.669.979,08	51.480.977,00
Jumlah Arus Masuk Kas		22.669.979,08	51.480.977,00
Arus Keluar Kas	6.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		130.872.917,64	19.171.070.518,64
Jumlah Arus Keluar Kas		130.872.917,64	19.171.070.518,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	6.5.3.3	(108.202.938,56)	(19.119.589.541,64)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	6.5.4		
Arus Masuk Kas	6.5.4.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		98.238.198.537,50	102.626.701.649,00
Jumlah Arus Masuk Kas		98.238.198.537,50	102.626.701.649,00
Arus Keluar Kas	6.5.4.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		98.238.198.537,50	102.632.914.149,00
Jumlah Arus Keluar Kas		98.238.198.537,50	102.632.914.149,00

Uraian	Ref CaLK	Tahun 2018	Tahun 2017
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	6.5.4.3	-	(6.212.500,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas selama Periode ini		(1.368.127.273,64)	(3.011.578.913,98)
Saldo Awal Kas di BUD		122.183.090.138,71	125.650.552.962,55
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD		1.190.267,43	(453.653.849,86)
Saldo Akhir Kas di BUD		120.826.153.132,50	122.183.090.138,71
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Rekening Peduli Gunung Agung		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana		-	-
Saldo Akhir Kas	6.5.5	120.826.153.132,50	122.183.090.138,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2018	2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	6.4.1				
PENDAPATAN - LO	6.4.1.1	1.516.305.870.171,78	1.548.221.858.885,37	(31.915.988.713,59)	(2,06)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	6.4.1.1.1	220.463.290.387,87	204.287.023.108,48	16.166.267.281,41	7,91
Pendapatan Pajak Daerah - LO	6.4.1.1.1.1	95.822.287.563,18	103.846.749.223,81	(8.024.451.660,63)	(7,73)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.4.1.1.1.2	13.210.781.775,67	11.728.099.636,50	1.482.682.139,17	12,64
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.4.1.1.1.3	22.338.638.040,10	12.076.751.263,24	10.261.886.776,86	84,97
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Seh - LO	6.4.1.1.1.4	89.081.572.988,92	76.635.422.982,91	12.446.150.006,01	16,24
PENDAPATAN TRANSFER	6.4.1.2	1.224.164.783.594,95	1.257.215.105.971,59	(33.050.322.376,64)	(2,63)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	6.4.1.2.1	937.885.910.117,00	949.134.029.659,00	(11.248.119.542,00)	(1,19)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	6.4.1.2.1.1	19.658.751.772,00	22.159.874.297,00	(2.501.122.525,00)	(11,29)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	6.4.1.2.1.2	1.301.005.591,00	1.073.244.507,00	227.761.084,00	21,22
Dana Alokasi Umum - LO	6.4.1.2.1.3	729.378.991.000,00	722.184.384.000,00	7.194.607.000,00	1,00
Dana Alokasi Khusus Fisik- LO	6.4.1.2.1.4	44.564.408.297,00	203.716.526.855,00	(159.152.118.558,00)	(78,12)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik- LO	6.4.1.2.1.5	142.982.753.457,00	-	142.982.753.457,00	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.4.1.2.2	99.489.619.000,00	71.182.742.000,00	28.306.877.000,00	39,77
Dana Penyesuaian - LO	6.4.1.2.2.1	99.489.619.000,00	71.182.742.000,00	28.306.877.000,00	39,77
Transfer Pemerintah Provinsi - LO	6.4.1.2.3	127.347.162.147,35	106.272.428.108,97	21.074.734.038,38	19,83
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	6.4.1.2.3.1	127.347.162.147,35	106.272.428.108,97	21.074.734.038,38	19,83
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	6.4.1.2.3.2	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	6.4.1.2.4	59.442.092.330,60	130.625.906.203,62	(71.183.813.873,02)	(54,49)
Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO	6.4.1.2.4.1	26.475.192.330,60	54.772.575.314,52	(28.297.382.983,92)	(51,66)
Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO	6.4.1.2.4.2	32.966.900.000,00	75.853.330.889,10	(42.886.430.889,10)	(56,54)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.4.1.3	71.687.796.208,96	86.719.729.807,32	(15.031.933.598,36)	(17,33)
Pendapatan Hibah	6.4.1.3.1	68.892.777.128,00	83.892.633.030,48	(14.999.855.904,48)	(17,82)
Pendapatan Lainnya	6.4.1.3.2	2.995.019.080,96	3.027.096.776,84	(32.077.695,88)	(1,06)
JUMLAH PENDAPATAN		1.816.306.870.171,78	1.848.221.858.885,37	(31.915.988.713,59)	(2,06)
BEBAN	6.4.1.2	1.445.692.386.779,10	1.406.012.349.265,92	39.680.037.513,18	2,82
Beban Pegawai	6.4.1.2.1	818.290.591.484,88	782.629.696.201,07	35.660.895.283,81	4,56
Beban Persediaan	6.4.1.2.2	94.353.361.525,82	87.181.133.006,88	7.172.228.518,94	8,23
Beban Jasa	6.4.1.2.3	131.335.124.284,98	93.075.333.369,57	38.259.790.915,41	41,11
Beban Pemeliharaan	6.4.1.2.4	24.104.032.224,00	25.815.495.661,00	(1.511.463.437,00)	(5,90)
Beban Perjalanan Dinas	6.4.1.2.5	47.750.587.410,28	53.643.475.790,00	(5.892.888.379,72)	(10,99)
Beban Bunga	6.4.1.2.6	22.984.558,17	633.649.863,42	(610.665.307,25)	(96,37)
Beban Subsidi	6.4.1.2.7	-	-	-	-
Beban Hibah	6.4.1.2.8	6.151.450.000,00	11.418.046.000,00	(5.266.596.000,00)	(46,13)
Beban Bantuan Sosial	6.4.1.2.9	19.463.987.700,00	12.461.691.081,00	7.002.296.619,00	56,19
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.4.1.2.10	113.268.830.581,53	133.626.757.656,05	(20.357.927.074,52)	(15,23)
Beban Penyisihan Piutang	6.4.1.2.11	3.782.070.488,67	4.479.373.424,12	(697.302.935,45)	(15,57)
Beban Transfer	6.4.1.2.12	177.892.729.548,77	175.318.953.803,81	2.573.775.744,96	1,47
Beban Lain-Lain	6.4.1.2.13	9.276.636.974,00	25.928.743.409,00	(16.652.106.435,00)	(64,22)
JUMLAH BEBAN		1.445.692.386.779,10	1.406.012.349.265,92	39.680.037.513,18	2,82
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		70.613.483.392,68	142.209.509.619,45	(71.596.026.226,77)	(50,35)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.4.2	(120.862.725,00)	(9.181.793.549,73)	9.060.930.824,73	(98,68)
Surplus Non Operasional	6.4.2.1	-	-	-	-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.4.2.1.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	6.4.2.1.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.4.2.1.3	-	-	-	-
Defisit Non Operasional	6.4.2.2	120.862.725,00	9.181.793.549,73	(9.060.930.824,73)	(98,68)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.4.2.2.1	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	6.4.2.2.2	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.4.2.2.3	120.862.725,00	9.181.793.549,73	(9.060.930.824,73)	(98,68)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(120.862.725,00)	(9.181.793.549,73)	9.060.930.824,73	(98,68)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		70.492.620.667,68	133.027.716.069,72	(62.535.095.402,04)	(47,01)

Uraian	Ref CaLK	2018	2017	Kenalkani/ (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA	6.4.3	(2.862.215.485,00)	(1.279.093.414,40)	(1.283.122.070,80)	100,31
Pendapatan Luar Biasa	6.4.3.1	-	-	-	
Beban Luar Biasa	6.4.3.2	2.862.215.485,00	1.279.093.414,40	1.283.122.070,80	100,31
JUMLAH POS LUAR BIASA		(2.862.215.485,00)	(1.279.093.414,40)	(1.283.122.070,80)	100,31
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	6.4.4	67.930.405.182,68	131.748.622.655,32	(63.818.217.472,64)	(48,44)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref/ CaLK	2018	2017
Ekuitas Awal	6.2.1	1.520.292.462.016,06	1.398.745.977.135,29
Surplus/(Defisit) LO	6.2.2	67.930.405.182,68	131.748.622.655,32
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	6.2.3	(122.323.264.636,45)	(10.202.137.774,55)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:	6.2.3.1	12.458.920.320,74	(2.739.383.026,94)
Koreksi peralatan dan mesin <i>extracomptable</i>		-	(2.842.394.343,34)
Koreksi gedung dan bangunan <i>extracomptable</i>		-	(1.104.035.900,00)
Koreksi akumulasi penyusutan <i>extracomptable</i>		-	1.207.047.216,40
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap		4.006.436.331,74	-
Penyesuaian penyisihan investasi		8.452.483.989,00	-
Koreksi ekuitas lainnya		-	-
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:	6.2.3.2	(134.782.184.857,19)	(7.462.754.747,61)
Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS		1.190.267,43	(2.831.635,46)
Koreksi saldo awal piutang PBB-P2		-	3.487.984,00
Koreksi saldo awal piutang retribusi telekomunikasi		-	(2.862.589,00)
Koreksi piutang lainnya		-	55.122.687,32
Koreksi penyisihan piutang pajak		4.285.521,38	26.179.550,84
Koreksi penyisihan piutang retribusi kesehatan		-	5.132.950,00
Koreksi penyisihan piutang bagi hasil pajak provinsi		-	89.620.327,41
Koreksi penyisihan piutang lainnya		-	101.168.163,92
Koreksi saldo awal persediaan		59.313.500,00	(16.847.000,00)
Pengembalian dana bergulir Disperindag		22.669.979,08	51.480.977,00
Koreksi Tanah		-	3.199.316.501,75
Koreksi peralatan dan mesin		(7.859.191.351,98)	1.513.375.339,89
Reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan		10.716.493.080,03	5.808.634.790,52
Reklasifikasi dan koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan		499.905.999,90	(46.145.211.944,48)
Reklasifikasi dan koreksi aset tetap lainnya		(10.766.179.491,98)	(11.827.603.322,00)
Reklasifikasi dan koreksi konstruksi dalam pengerjaan		(1.189.366.000,00)	(1.048.520.054,00)
Reklasifikasi dan koreksi akumulasi penyusutan		(126.703.716.058,53)	3.269.423.201,30
Koreksi aset lain-lain		434.574.490,83	(301.448.466,00)
Pembayaran bagian lancar utang jangka panjang TA 2016		-	33.329.558.931,46
Koreksi Utang		19.455.814,95	647.662.353,01
Lain-lain PAD yang seh RSUD Tahun 2016 belum diakui		-	(24.000.000,00)
Koreksi Pendapatan Hibah Aset		-	3.806.406.524,91
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang		(30.108.495,61)	-
Koreksi Penyisihan Piutang		8.487.887,31	-
Koreksi ekuitas lainnya		-	-
Ekuitas Akhir	6.2.4	1.465.899.602.662,29	1.520.292.462.016,06

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amlopura, 22 Mei 2019
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2018	2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	6.6.1	122.183.090.138,71	125.644.340.402,55
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.6.2	(122.184.280.406,14)	(125.188.456.552,69)
Subtotal		(1.190.267,43)	455.883.849,86
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.6.3	120.826.153.132,50	122.183.090.138,71
Subtotal		120.824.962.865,07	122.638.973.988,57
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		1.190.267,43	(455.883.849,86)
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	6.6.4	120.826.153.132,50	122.183.090.138,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amlapura, 22 Mei 2019
BUPATI KARANGASEM

GUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2017
PENDAPATAN	6.3.1	1.561.741.927.097,72	1.482.950.696.123,48	94,95	1.525.935.905.692,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.3.1.1	234.000.000.000,00	200.362.025.514,55	85,62	198.663.672.239,22
Pendapatan Pajak Daerah	6.3.1.1.1	116.501.484.429,82	91.995.240.970,84	78,96	96.850.262.306,72
Pendapatan Retribusi Daerah	6.3.1.1.2	16.362.770.000,00	13.199.321.374,00	71,88	12.590.471.840,26
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.3.1.1.3	11.741.521.666,18	10.750.650.743,67	91,56	11.519.621.044,18
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.3.1.1.4	87.394.223.904,00	84.416.812.426,04	96,59	77.703.317.048,08
PENDAPATAN TRANSFER	6.3.1.2	1.270.889.827.097,72	1.221.829.894.751,97	96,14	1.266.307.329.391,72
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.3.1.2.1	953.288.782.000,00	937.885.910.117,00	98,38	949.134.029.659,00
Dana Bagi Hasil Pajak	6.3.1.2.1.1	22.570.550.000,00	19.658.751.772,00	87,10	22.159.874.297,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	6.3.1.2.1.2	1.424.283.000,00	1.301.005.591,00	91,34	1.073.244.507,00
Dana Alokasi Umum	6.3.1.2.1.3	729.378.991.000,00	729.378.991.000,00	100,00	722.184.384.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	6.3.1.2.1.4	54.682.477.000,00	44.564.408.297,00	81,50	203.716.526.655,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.3.1.2.1.5	145.232.481.000,00	142.982.753.457,00		
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.3.1.2.2	99.489.619.000,00	99.489.619.000,00	100,00	71.182.742.000,00
Dana Penyesuaian	6.3.1.2.2.1	99.489.619.000,00	99.489.619.000,00	100,00	71.182.742.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	6.3.1.2.3	114.854.628.789,52	125.012.273.304,37	108,84	115.364.651.529,10
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	6.3.1.2.3.1	114.854.628.789,52	125.012.273.304,37	108,84	115.364.651.529,10
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6.3.1.2.3.2	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	6.3.1.2.4	103.236.797.308,20	59.442.092.330,60	57,58	130.625.906.203,62
Bantuan Keuangan dari Provinsi	6.3.1.2.4.1	27.769.897.308,20	26.475.192.330,60	95,34	54.772.575.314,52
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	6.3.1.2.4.2	75.466.900.000,00	32.966.900.000,00	43,68	75.853.330.899,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.3.1.3	56.872.100.000,00	60.758.775.856,96	106,83	60.964.904.061,13
Pendapatan Hibah	6.3.1.3.1	56.872.100.000,00	57.763.756.774,00	101,57	57.937.837.284,29
Pendapatan Lainnya	6.3.1.3.2	-	2.995.019.082,96		3.027.066.776,84
JUMLAH PENDAPATAN		1.561.741.927.097,72	1.482.950.696.123,48	94,95	1.525.935.905.692,07
BELANJA DAERAH	6.3.2	1.597.996.927.097,72	1.480.600.620.458,56	92,65	1.506.221.682.564,41
BELANJA OPERASI	6.3.2.1	1.229.708.129.999,59	1.155.238.912.468,07	93,94	1.093.006.801.197,60
Belanja Pegawai	6.3.2.1.1	752.262.226.479,86	735.880.551.079,62	97,82	712.006.528.726,83
Belanja Barang	6.3.2.1.2	445.552.903.519,73	411.039.360.832,28	92,25	367.534.860.607,25
Belanja Bunga	6.3.2.1.3	100.000.000,00	22.984.556,17	22,98	633.649.863,42
Belanja Subsidi	6.3.2.1.4	-	-	-	-
Belanja Hibah	6.3.2.1.5	7.143.000.000,00	6.151.450.000,00	86,12	11.370.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial	6.3.2.1.6	24.650.000.000,00	2.144.566.000,00	8,70	1.461.184.000,00
BELANJA MODAL	6.3.2.2	182.209.840.233,35	144.906.762.956,72	79,53	237.069.886.363,00
Belanja Modal - Tanah	6.3.2.2.1	816.700.924,00	-	-	-
Belanja Modal - Perakatan dan Mesin	6.3.2.2.2	40.587.942.012,00	34.207.855.565,05	84,28	47.643.769.912,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	6.3.2.2.3	29.535.856.520,00	26.449.987.947,02	89,55	60.248.410.581,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.3.2.2.4	94.093.230.100,00	68.651.037.477,65	72,96	111.925.459.217,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	6.3.2.2.5	17.176.110.677,35	15.597.881.967,00	90,81	17.252.246.653,00
Belanja Aset Lainnya	6.3.2.2.6	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	6.3.2.3	3.401.836.886,90	2.562.215.485,00	75,32	828.041.200,00
Belanja Tak Terduga	6.3.2.3.1	3.401.836.886,90	2.562.215.485,00	75,32	828.041.200,00
BELANJA TRANSFER	6.3.2.4	182.677.120.307,88	177.892.729.548,77	97,38	175.318.953.803,81
Bagi Hasil Pendapatan	6.3.2.4.1	17.532.353.075,88	13.260.786.666,77	75,64	9.484.943.389,38
Bantuan Keuangan	6.3.2.4.2	165.144.767.232,00	164.631.942.882,00	99,69	165.834.010.414,43
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.597.996.927.097,72	1.480.600.620.458,56	92,65	1.506.221.682.564,41
SURPLUS/ DEFISIT		(36.255.000.000,00)	2.350.075.664,92	(6,48)	19.714.223.127,66
PEMBIAYAAN DAERAH	6.3.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.3.3.1	40.000.000.000,00	122.206.950.385,22	305,52	125.239.937.529,69
Penggunaan SILPA	6.3.3.1.1	40.000.000.000,00	122.184.280.406,14	305,46	125.188.456.552,69
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.3.3.1.2	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	6.3.3.1.3	-	22.689.979,08		51.480.977,00

Uraian	Ref. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2017
PENGELIARAN PEMBIAYAAN	6.3.3.2	3.745.000.000,00	3.730.872.917,64	99,62	22.771.070.518,64
Pergerakan Modal Pemerintah Daerah	6.3.3.2.1	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00	3.600.000.000,00
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	6.3.3.2.2	145.000.000,00	130.872.917,64	90,26	19.171.070.518,64
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH		36.255.000.000,00	118.478.077.467,68	328,79	102.468.867.011,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			120.826.163.132,50		122.183.090.130,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2018	Tahun 2017
ASET	6.1.1	1.483.255.523.263,59	1.543.062.430.875,70
ASET LANCAR	6.1.1.1	214.171.033.944,22	195.368.290.118,89
Kas di Kas Daerah	6.1.1.1.1	104.396.111.251,41	107.201.056.359,84
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1.1.1.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	6.1.1.1.3	92.065.976,86	88.108.990,00
Kas di Bendahara BLUD	6.1.1.1.4	100.735.375,50	2.926.579.789,00
Kas di Bendahara JKN	6.1.1.1.5	11.958.056.410,83	8.831.301.662,33
Kas di Bendahara BOS	6.1.1.1.6	1.187.155.341,03	1.793.348.663,70
Kas di Peduli Gunung Agung Karangasem	6.1.1.1.7	-	50.000,00
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	6.1.1.1.8	3.092.028.776,87	1.342.644.673,84
Piutang	6.1.1.1.9	78.286.208.039,39	59.656.861.919,05
Piutang Pajak	6.1.1.1.9.1	62.542.947.064,74	58.445.521.641,74
Penyisihan Piutang Pajak	6.1.1.1.9.2	(24.657.538.832,85)	(21.062.880.786,16)
Piutang Retribusi	6.1.1.1.9.3	102.995.013,00	100.078.778,00
Penyisihan Piutang Retribusi	6.1.1.1.9.4	(1.029.950,13)	(10.977.658,31)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.1.1.1.9.5	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.1.1.1.9.6	-	-
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	6.1.1.1.9.7	11.296.921.584,45	8.962.032.741,47
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	6.1.1.1.9.8	(112.969.215,84)	(89.620.327,41)
Piutang lainnya	6.1.1.1.9.9	29.782.419.552,54	13.715.394.053,20
Penyisihan Piutang Lainnya	6.1.1.1.9.10	(667.537.176,52)	(402.686.523,48)
Belanja Dibayar Dimuka	6.1.1.1.10	103.306.833,35	23.720.833,33
Persediaan	6.1.1.1.11	14.955.366.938,98	13.504.617.227,80
Jumlah Aset Lancar		214.171.033.944,22	195.368.290.118,89
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.1.1.2	116.336.793.443,73	104.049.025.463,37
Investasi Non Permanen	6.1.1.2.1	7.541.994.453,00	-
Dana Bergulir	6.1.1.2.1.1	267.549.150,00	290.219.129,08
Penyisihan Dana Bergulir	6.1.1.2.1.2	(267.549.150,00)	(290.219.129,08)
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	6.1.1.2.1.3	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00
Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	6.1.1.2.1.4	(3.890.242.066,00)	(11.432.236.519,00)
Investasi Permanen	6.1.1.2.2	108.794.798.990,73	104.049.025.463,37
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.1.1.2.2.1	108.794.798.990,73	104.049.025.463,37
Jumlah Investasi Jangka Panjang		116.336.793.443,73	104.049.025.463,37
ASET TETAP	6.1.1.3	1.140.014.831.382,66	1.231.346.825.291,29
Tanah	6.1.1.3.1	185.010.430.857,25	185.010.430.857,25
Peralatan dan Mesin	6.1.1.3.2	409.599.629.865,14	380.532.215.997,07
Gedung dan Bangunan	6.1.1.3.3	770.146.635.249,86	728.732.289.259,81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.1.3.4	1.179.328.458.482,14	1.111.881.990.004,59
Aset Tetap Lainnya	6.1.1.3.5	44.926.596.378,00	40.100.293.900,98
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.1.1.3.6	6.924.847.526,00	4.919.283.926,00
Akumulasi Penyusutan	6.1.1.3.7	(1.455.921.766.973,73)	(1.219.829.878.654,41)
Jumlah Aktiva Tetap		1.140.014.831.382,66	1.231.346.825.291,29
DANA CADANGAN	6.1.1.4	-	-
Dana Cadangan	6.1.1.4.1	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	6.1.1.5	12.732.864.492,98	12.298.290.002,15
Tagihan Penjualan Angsuran	6.1.1.5.1	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	6.1.1.5.2	-	-
Kemiraaan dengan Pihak Ketiga	6.1.1.5.3	-	-
Aset Tidak Berwujud	6.1.1.5.4	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.1.1.5.5	-	-
Aset Lain-Lain	6.1.1.5.6	12.732.864.492,98	12.298.290.002,15
Jumlah Aset Lainnya		12.732.864.492,98	12.298.290.002,15
JUMLAH ASET		1.483.255.523.263,59	1.543.062.430.875,70
KEWAJIBAN	6.1.2	17.355.920.601,30	22.769.968.859,64
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.1.2.1	17.290.484.142,29	22.573.659.482,99
Utang Perhitungan Pihak ketiga	6.1.2.1.1	-	-
Utang Bunga	6.1.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	6.1.2.1.3	130.872.917,64	130.872.917,64
Pendapatan Diterima Dimuka	6.1.2.1.4	302.642.824,32	64.760.833,33
Utang Belanja	6.1.2.1.5	16.856.968.400,33	22.378.025.732,02
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.290.484.142,29	22.573.659.482,99

Uraian	Reff CaLK	Tahun 2018	Tahun 2017
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.1.2.2	65.436.459,01	196.309.376,65
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	6.1.2.2.1	65.436.459,01	196.309.376,65
Jumlah Utang Jangka Panjang		65.436.459,01	196.309.376,65
JUMLAH KEWAJIBAN		17.355.920.601,30	22.769.968.859,64
EKUITAS	6.1.3	1.485.899.602.662,29	1.520.292.462.016,06
EKUITAS	6.1.3.1	1.485.899.602.662,29	1.520.292.462.016,06
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.493.255.523.263,80	1.543.062.430.875,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amilapura, 22 Mei 2019
BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI